



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 55 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH  
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa program kegiatan yang melibatkan perangkat daerah dinilai sudah tidak relevan, sehingga dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan perlu dilakukan penyesuaian untuk itu Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bupati Nunukan No 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN:** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dengan Sistematika yang terdiri:

BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : ANALISIS KONDISI KAWASAN PERDESAAN;  
BAB III: ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS;  
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; dan  
BAB VI: PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN DAN PENDANAAN.

- (2) Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada perkembangan dan ketentuan Perundang-Undangan yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP  
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NUNUKAN NOMOR 55 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN  
SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN

BAB I  
PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pasal 83 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Tindak lanjut dari amanat Undang-Undang tentang desa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi supervisor dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan salah satunya adalah penetapan satu kawasan perdesaan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai *pilot project*.

Berdasarkan desain besar (*grand design*) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2025 terdapat pembahasan mengenai cakupan pengembangan dan lokasi prioritas. Kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terletak di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia sehingga termasuk dalam lokasi prioritas pengembangan. Perundang-undangan yang mengatur wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penyelesaian batas wilayah negara, serta mencerminkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*", menjadi "*outward looking*" sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsep dasar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dikembangkan salah satunya berdasarkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai *entry point* pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. Lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan dibutuhkan sebagai fokus pengelolaan perbatasan, penetapan lokasi prioritas atau kecamatan tidak hanya dilihat dari pembangunan lingkup kecamatan tetapi sebagai sistem pembangunan kawasan yang bertumpu pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan simpul-simpul pengembangannya. Kawasan perdesaan perkebunan yang terletak di Kecamatan Sebatik Tengah

termasuk sebagai lokasi prioritas penanganan tahun 2010-2014 dan tambahan untuk tahun 2015-2019.

Dalam agenda prioritas pengelolaan batas Negara dan kawasan perbatasan darat tahun 2011-2025 aspek ekonomi kawasan terkait dengan keberlangsungan program dalam pembangunan kawasan perdesaan perbatasan Negara yaitu agenda penataan ruang di kawasan perbatasan darat, percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN di kawasan perbatasan darat, pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat, dan pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional. Selanjutnya aspek sosial dasar memiliki agenda percepatan dan peningkatan jangkauan mutu pelayanan sosial dan percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar.

Rencana aksi kementerian/lembaga pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun anggaran 2015 yang terkait kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terdapat program sebagai berikut:

- a. Peningkatan struktur jalan lingkar pulau sebatik,
- b. Rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan lingkar pulau sebatik,
- c. Pembangunan 4 RKB SMAN I Sebatik Tengah, dan
- d. Modernisasi moda transportasi laut yaitu penyebrangan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik - Tawau Malaysia 30 GT.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum (legal basis) yang mendasari pelaksanaan kegiatan pengusulan, penetapan dan pembangunan kawasan perdesaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 46/DPKP/SK/04/2018 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan

## 1.3 Pendekatan dan Metodologi

### a. *Focus Grup Discussion* (FGD)

*Focus Grup Discussion* (FGD) tingkat Kabupaten dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Nunukan dengan melibatkan jajaran SKPD merumuskan kawasan perdesaan yang dimaksud oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selama proses berjalannya FGD muncul beberapa usulan kandidat kawasan perdesaan yaitu Kawasan Perkebunan Sawit Desa Sekaduyan taka Kecamatan Sungai Menggaris, Kawasan Desa Tertinggal Krayandan Krayan Selatan, Kawasan Pengelolaan garam Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik, dan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah.



Gambar I-1  
FGD Tingkat Kabupaten di Bappeda Kabupaten Nunukan  
*Sumber: Dokumentasi 2015*

Melalui pendalaman substansi terkait dengan potensi, masalah dan ketentuan yang disepakati sesuai pedoman dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa kawasan perdesaan yang ditetapkan dalam bentuk kluster desa yang saling berbatasan baik hanya dalam satu maupun lebih dari satu kecamatan, maka masing-masing camat dari kecamatan diusulkan tersebut mengajukan desa-desa yang akan diusulkan sebagai kawasan perdesaan dengan menyampaikan potensi detail dan masalah utama yang dihadapi.

Kawasan Perkebunan Sawit di Desa Sekaduyan taka Kecamatan Sungai Menggaris sebagian besar lahannya dikuasai oleh hak milik perusahaan, sehingga kurang tepat dikembangkan menjadi kawasan perdesaan karena dalam prosesnya akan susah untuk intervensi kawasan. Usulan kedua adalah Desa Tertinggal Krayan dan Krayan Selatan yang berlokasi di bagian paling barat Kabupaten Nunukan, tetapi sama seperti Desa Sekaduyan taka, lahan Desa Krayan juga dikuasai oleh hak guna usaha milik perusahaan.

Usulan ketiga adalah Kawasan Pengelolaan garam Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik, kawasan ini sedang dalam proses pembelajaran pembuatan garam dari air laut, tetapi kawasan ini memiliki sarana yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan desa lainnya di Sebatik. Usulan selanjutnya adalah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah, dengan melihat potensi perkebunan dan masalah sarana dan prasarana yang ada khususnya di kawasan perbatasan. Dari usulan-usulan tersebut, berdasar potensi dan permasalahan yang sama serta pertimbangan lokasi perbatasan akhirnya ditetapkan Kawasan Perdesaan Perbatasan dengan focus tema Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah. Kawasan perdesaan ini terdiri dari 4 desa itu Desa Maspul, Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau, dan Desa Bukit Harapan.



Gambar I-2  
FGD Tingkat Desa di Kecamatan Sebatik Tengah  
*Sumber: Dokumentasi 2015*

Dalam FGD tingkat masyarakat desa yang diwakili oleh kepala desa, tokoh masyarakat, unsur BPD, LPM dan dari pihak kecamatan diwakili oleh Sekretaris Camat dihadiri juga oleh SKPD Kabupaten Nunukan yaitu BAPPEDA dan BPMPD. FGD tingkat desa ini adalah

untuk melakukan analisis potensi dan permasalahan pertanian serta *needs assessment* atau *menelusuri, mengeksplorasi kebutuhan masyarakat* calon kawasan perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah.

Dari FGD yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Sebatik Tengah diperoleh hasil dan kemudian dibuat catatan kesepakatan penetapan kawasan perdesaan tingkat desa serta inventarisasi potensi, identifikasi masalah dan penelusuran kebutuhan untuk merancang dan mendukung implementasi dan pelaksanaan program untuk mendukung terwujudnya kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara.

b. Pendekatan WCM (*World Cafe Method*)

Untuk lebih meningkatkan partisipasi peserta, maka Metoda WCM (*World Caf Methode*) akan lebih baik dari metoda FGD biasa. Yang membedakan dari WCM adalah pengaturan peserta yang terlibat diskusi di setiap meja dibentuk seperti cafe atau warung kopi. Metoda ini dirancang agar semua peserta yang hadir, walaupun ditempatkan di meja yang berbeda-beda, tapi dipastikan bisa mengikuti semua yang ada di setiap meja. Berdasarkan pengalaman, beberapa keunggulan dari metoda WCM, yaitu (1) Tiap peserta mendapatkan peluang yang sama untuk turut membahas tema yang ada di masing-masing meja/kelompok; (2) Tema tiap meja dapat dibahas oleh seluruh peserta FGD, sehingga akan mendapatkan masukan yang lebih lengkap karena semua stakeholder bisa berpartisipasi aktif untuk mengungkapkan pendapatnya seperti di cafe; (3) Mengatasi permasalahan minimnya partisipasi peserta apalagi di tingkat kawasan perdesaan pada umumnya didominasi oleh kalangan pemerintahan dan kurang partisipasi dari masyarakat desa / swasta sehingga untuk menggali permasalahan dan kebutuhan malah tidak seperti yang diinginkan karena seringkali dikuasai oleh stakeholder yang paling banyak bicara. Sebelum dilakukan FGD, sebaiknya perlu dilakukan pendekatan yang baru dalam merencanakan kawasan, yakni dengan Pendekatan Appreciative Inquiry. Pendekatan ini adalah Cara Pandang Baru, yang : (i) memandang suatu fenomena lebih positif atau berbasis kekuatan, sebagai suatu pijakan untuk mencapai tujuan atau visi yang lebih tinggi; dan (ii) Cara pandang berbasis kekuatan: (a) Asset Based Approach, (b) Sustainable Livelihood Approach dan (iii) Appreciative Inquiry. Pendekatan baru ini adalah inisiatif pembaruan dari Cara Pandang Lama, dimana melakukan pendekatan dengan cara pemecahan permasalahan. Pendekatan penyelesaian masalah memandang suatu fenomena sebagai masalah yang harus diperbaiki tanpa mempertanyakan tujuan atau visi dalam tingkatan yang lebih tinggi.



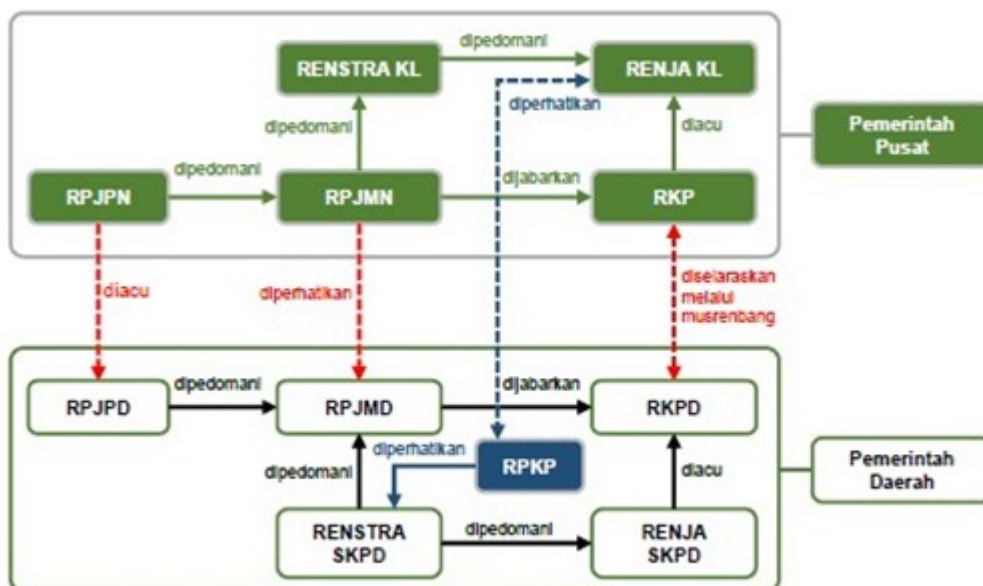
Gambar I-3

FGD Tingkat Desa di Kecamatan Sebatik Tengah  
*Sumber: Dokumentasi 2021*

1.4 Kedudukan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 79 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dipergunakan untuk menyusun dokumen: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan 2) Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3) Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ketiga dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan dokumen perencanaan Desa yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des ).

Proses penyusunan seluruh dokumen Perencanaan pembangunan desa dan APB desa tersebut harus mengikut sertakan masyarakat Desa. Rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun termaktub dalam dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang memuat program-program pembangunan, yang proses penyusunannya dilakukan dengan cara mengkombinasikan pendekatan top down dan bottom up. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut ini gambaran kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap dokumen perencanaan lainnya.



Gambar I-4

## Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Kedudukan RPKP terhadap sistem pusat-pusat eksternal tata ruang dapat digambarkan seperti gambar di atas, dimana RPKP akan dikembangkan dalam dimensi ekonomi, dimana pusat kegiatannya dapat setara dengan PKL(p) yang dipromosikan.

Kedudukan RPKP berikutnya dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 124 menyebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan Dilaksanakan di Lokasi yang Telah Ditetapkan oleh bupati/walikota. Beberapa poin penting didalam pasal tersebut adalah:

- 1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b) Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota;
  - c) Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan
  - d) Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.
- 2) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- 3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- 4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
- 5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi
- 6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dicantumkan dalam RPJMD kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota.
- 7) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat
- 8) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

## BAB II

### ANALISIS KONDISI KAWASAN PERDESAAN

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, desa-desa dapat digolongkan menjadi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. IDM diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu IPD diukur berdasarkan 5 aspek yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Klasifikasi Desa yang dihasilkan berdasar nilai IDM dipergunakan untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Berikut merupakan nilai IPD dan IDM kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara:

**Tabel II-1**  
**Nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 dan**  
**Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 Kawasan Perdesaan Perkebunan**  
**di Perbatasan Negara**

No	Desa	Nilai IDM	Status		Nilai IPD	Status	
			Berkembang (> 0,5989 & ≤ 0,7072)	Mandiri > 0,8155		Tertinggal (IPD < 50)	Berkembang (50 < IPD < 75)
1	Maspul	0,6900			38,53		
2	Sei Limau	0,6667			45,60		
3	Aji Kuning	0,8222			64,18		
4	Bukit Harapan	0,6059			47,84		

Sumber: IPD 2014 dan IDM 2020

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Desa, kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara 75% atau tiga Desa masuk dalam kategori tertinggal karena nilai IDM < 50, Desa yang termasuk kategori tertinggal yaitu Desa Maspul dengan nilai IPD terendah yaitu 38,53, Desa Sei Limau 45,60 dan Desa Bukit Harapan dengan nilai IPD 47,84 serta hanya 1 desa yang masuk kategori desa berkembang yaitu Desa Aji Kuning dengan nilai IPD 64,18.

Sejalan dengan IPD, nilai Indeks Desa Membangun (IDM) juga menunjukkan kategori yang sama dengan tiga desa berkembang dengan nilai IDM berkisar antara > 0,5989 & ≤ 0,7072 sedangkan Desa Aji Kuning termasuk desa mandiri karena nilai IDM > 0,8155 yaitu 0,8222. Dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara ini menunjukkan hanya terdapat 1 Desa berkembang yaitu Desa Aji Kuning, baik itu dihitung berdasarkan nilai IPD atau IDM. Desa Aji Kuning jika dilihat secara umum merupakan Desa yang paling lengkap untuk fasilitas kegiatannya jika dibanding tiga desa lainnya, hal ini terkait lokasi Desa Aji Kuning yang paling strategis sebagai jalur perdagangan dan transportasi menuju keluar kawasan dan ke daerah perbatasan untuk menuju Malaysia.

## 2.1 Fisik Dasar

### 2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara terletak di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kawasan ini merupakan wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yang terdiri dari 4 desa yang termasuk dalam kawasan ini yaitu Desa Aji Kuning, Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau, dan Desa Maspul. Wilayah kawasan perdesaan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Sebatik pada tahun 2011. Secara administratif, batas-batas kawasan perdesaan ini yaitu:

Sebelah Utara : Sabah – Malaysia Timur;  
 Sebelah Timur : Kecamatan Sebatik Utara dan Sebatik Timur;  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Sebatik Barat; dan  
 Sebelah Barat : Kecamatan Sebatik Barat.

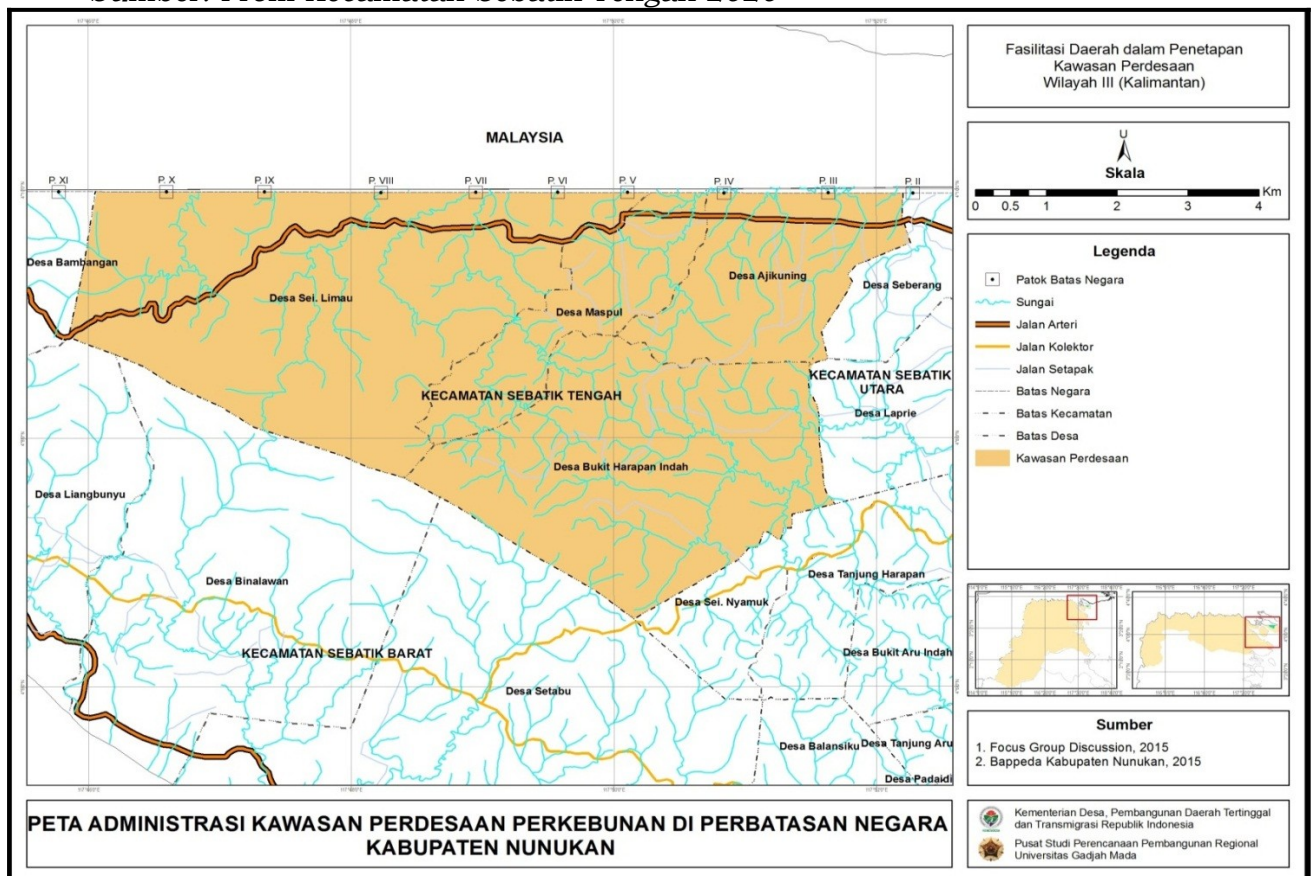
Luas wilayah kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara keseluruhan sekitar 47,71 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 desa di tepi kawasan hutan dan 1 desa di luar kawasan hutan. Desa Sungai Limau merupakan desa yang paling luas wilayahnya yaitu 20,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 43,64% dari luas kawasan perdesaan keseluruhan.

Tabel II-2

Luas Desa Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase %
1	Aji Kuning	6,45	13,52
2	Sungai Limau	20,82	43,64
3	Maspul	5,31	11,13
4	Bukit Harapan	15,13	31,71
	<b>Jumlah</b>	<b>47,71</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020



Gambar II-1

Peta Administrasi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Sumber: Bappeda Kabupaten Nunukan

### 2.1.2 Klimatologi

Curah hujan di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tergolong rendah-sedang dengan tingkat rata-rata 2000-2500 mm/tahun. Di bagian selatan yaitu Desa Bukit Harapan kawasan curah hujan lebih tinggi dibanding bagian utara sekitar 2250-2750 mm/tahun, sedangkan di bagian utara yaitu Desa Sungai Limau, Maspul dan Aji Kuning curah hujan hanya mencapai 1750-2250 mm/tahun.

**Tabel II-3**  
**Curah Hujan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

No	Curah Hujan (mm/Th)	Luas (Ha)	Persentas e
1	1750-2250	3.534	74%
2	2250-2750	1.237	26%
<b>Jumlah</b>		<b>4.771</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)*

### 2.1.3 Topografi

Kemiringan lereng 0-2% yaitu daerah datar sebagian besar terletak di Desa Aji Kuning dan Sungai Limau yaitu di daerah perbatasan Negara, kawasan didominasi area kelas lereng 5-15% yang tergolong dalam daerah bergelombang ringan sampai sedang dan 15-40% yang tergolong dalam wilayah topografi curam terdapat di semua desa, topografi wilayah sangat curam dengan kelas lereng >40% yang terletak hanya pada wilayah perbukitan curam di wilayah perbatasan antara Desa Sungai Limau dengan Desa Liang Bunyu dan Binalawan, dan perbatasan antara Desa Bukit Harapan dan Binalawan. Berikut pembagian kelas lereng di kawasan perdesaan:

- Wilayah topografi dataran dengan tingkat kemiringan lereng <2%.
- Wilayah topografi datar bergelombang dengan tingkat kemiringan lereng 2-5%
- Wilayah topografi agak dergelombang ringan-sedang dengan tingkat kemiringan sekitar 5-15%
- Wilayah topografi curam dengan tingkat kemiringan lereng sekitar 15-40%
- Wilayah topografi sangat curam dengan tingkat kemiringan lereng >40%

**Tabel II-4**  
**Kemiringan Lereng Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

No.	Kemiringan (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
1.	<2	Datar	4,31
2.	2-5	Datar bergelombang	4.233,66
3.	5-15	Bergelombang ringan-sedang	343,12
4.	15-40	Curam	157,16
5.	>40	Sangat Curam	33,08

*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)*

Dilihat berdasarkan ketinggian lahan di kawasan perdesaan sebatik tengah terbagi menjadi beberapa elevasi atau kelas lereng. Ketinggian kawasan perdesaan diantara 15-430 Mdpl, kawasan ini didominasi oleh satuan ketinggian 51-110 Mdpl, dengan ketinggian lahan yang paling tinggi berada di perbukitan batas kecamatan di bagian barat Desa Sungai limau dengan elevasi 311-430 Mdpl. Kawasan perdesaan terdiri dari beragam bentuk lahan, tetapi didominasi oleh perbukitan rendah-sedang dengan daerah tergolong bergelombang ringan sampai sedang. Terdapat wilayah perbukitan curam di bagian barat Desa Sungai limau. Berikut data ketinggian lahan dengan jarak satuan ketinggian yang lebih lebar.

**Tabel II-5**  
**Ketinggian Lahan Kawasan Perdesaan Perkebunan**  
**di Perbatasan Negara**

Ketinggian	Luas wilayah (Ha)	Persentase
0-100 m	4.103	85,99 %
100-500 m	668	14,01 %
<b>Jumlah</b>	<b>4.771</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)*

#### 2.1.4 Jenis Tanah

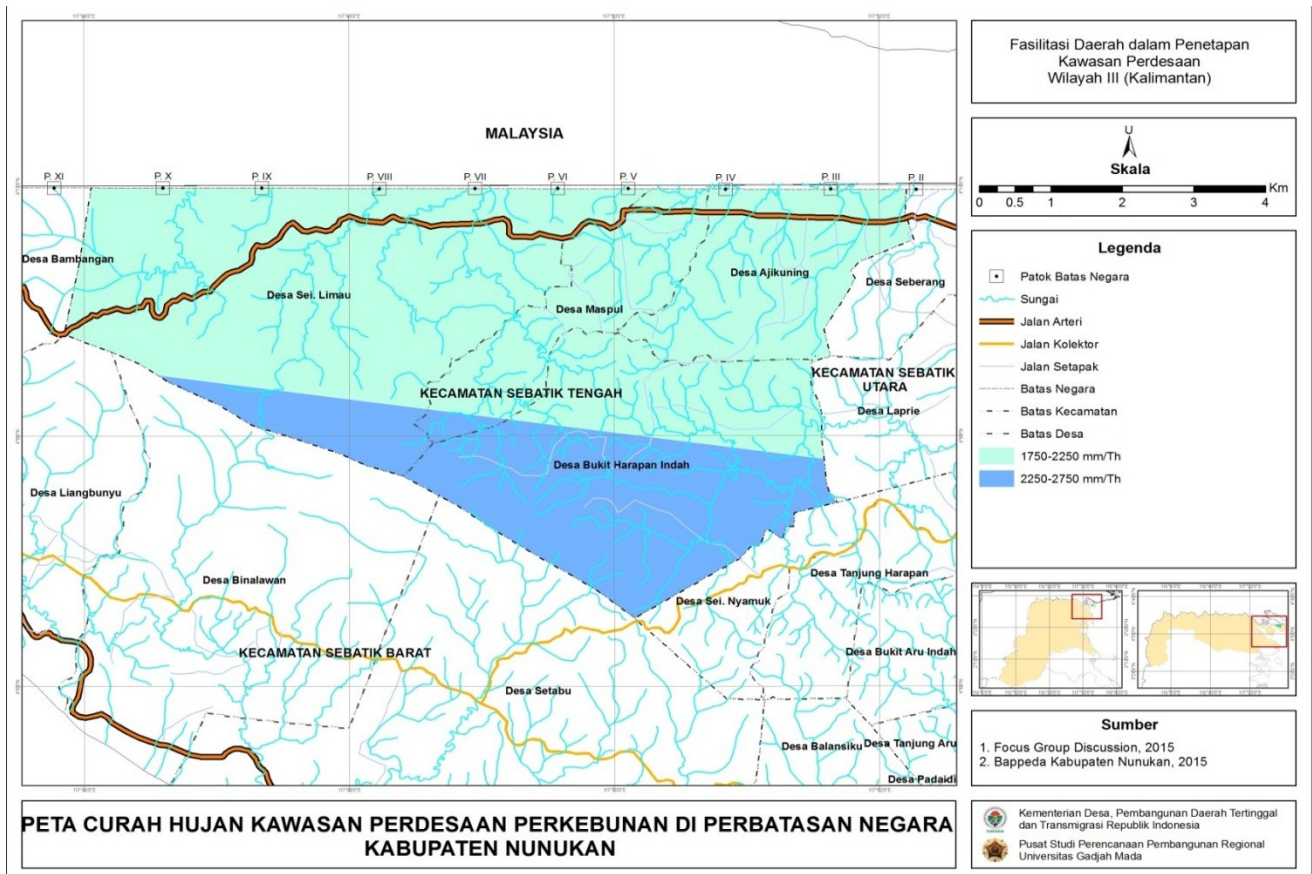
Jenis tanah yang terdapat di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara adalah jenis tanah tropaquets, tropodults, dan paleudults. Jenis tanah di kawasan perdesaan didominasi oleh jenis tanah tropodults sekitar 89,98% yang tersebar di semua desa, jenis tanah ini mirip dengan podsolik merah kuning dan biasanya berada di daerah lereng pegunungan atau bukit dengan topografi bergelombang sampai berbukit 50-350 m dpl dengan tingkat permeabilitas yang rendah.

Jenis tanah tropaquets hanya tersebar di Desa Aji Kuning dan jenis tanah paleudults hanya terdapat di Desa Bukit Harapan.

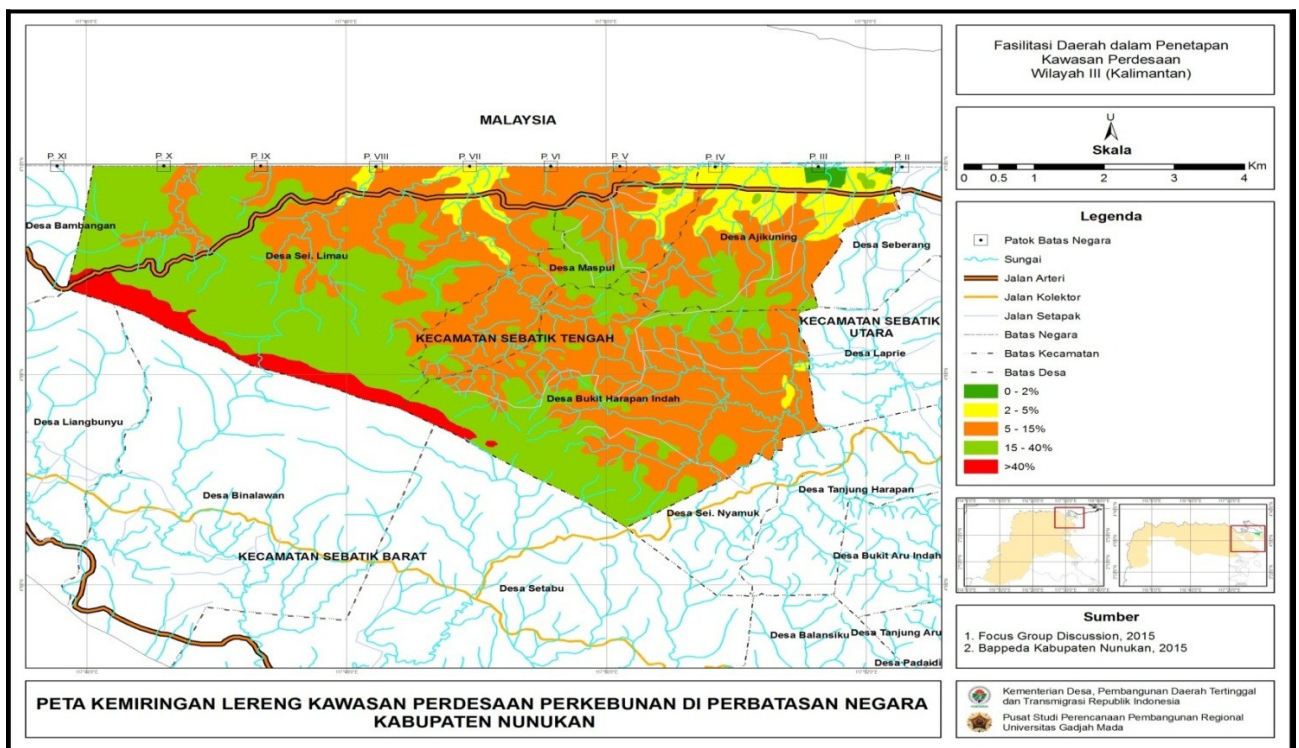
**Tabel II-6**  
**Luas Jenis Tanah Kawasan Perdesaan Perkebunan**  
**di Perbatasan Negara**

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Tropaquets	133	2,79%
2	Tropodults	4.293	89,98%
3	Paleudults	345	7,23%
<b>Jumlah</b>		<b>4.771</b>	<b>100,00%</b>

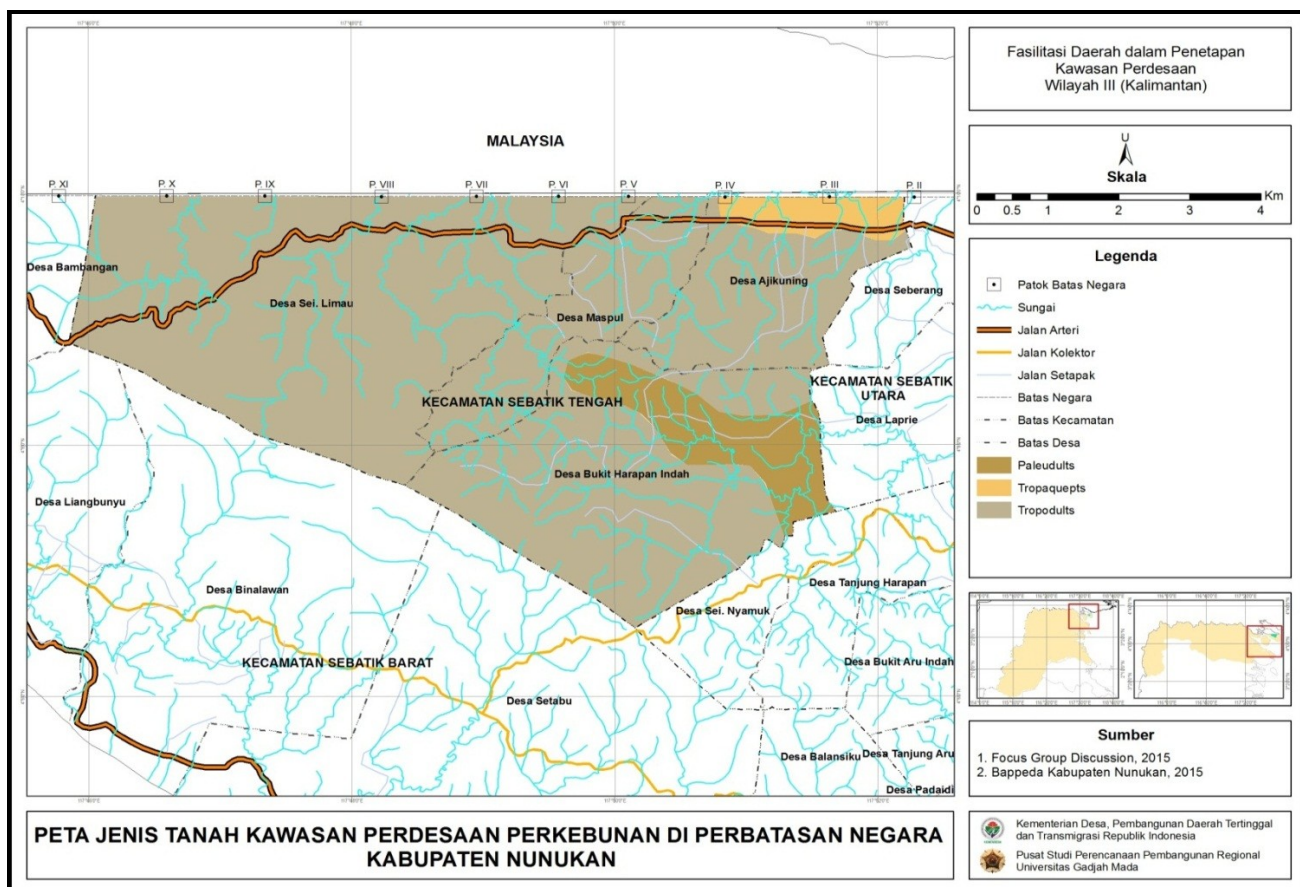
*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)*



**Gambar II-2**  
**Peta Curah Hujan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**  
*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034*



**Gambar II-3**  
**Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**  
*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034*



**Gambar II-4**

**Peta Jenis Tanah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034*

**2.1.5 Geologi**

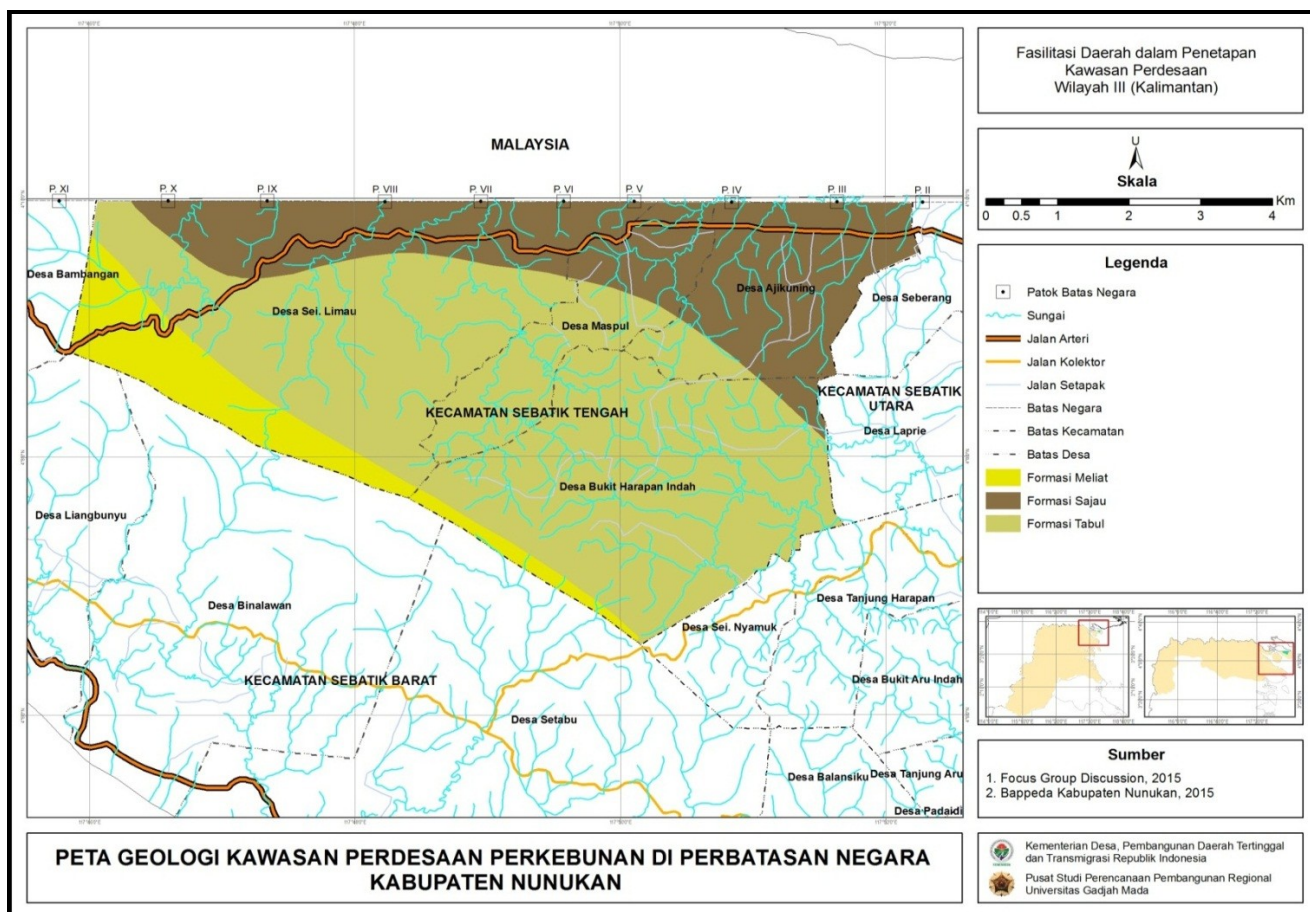
Secara regional daerah Perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya merupakan bagian dari Cekungan Tarakan, yang memiliki struktur utama berupa sumbu lipatan berarah barat laut-tenggara. Menurut penelitian departemen ESDM tahun 2006, Pulau Sebatik tersusun oleh batuan sedimen yang terdiri dari perselingan batupasir, lanau dan lempung. Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik adalah sebuah antiklin yang sumbunya memanjang dari arah barat laut ke tenggara dimana batuan di kawasan perbukitan cenderung lunak, mudah terkikis, mudah longsor dan beberapa diantaranya mudah mengembang (*Swelling*) hal tersebut terjadi pada singkapan- singkapan alam lapisan tanah tertutup (*soil*) umumnya tipis.

Kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara lebih dari 50% luas lahan sekitar 2.956 Ha terdiri dari formasi tabul yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu lumpur, batu pasir, batu gamping, dan batu bara, di bagian atas umumnya gampingan, ketebalan formasi tabul sekitar 600 meter. Formasi saju merupakan formasi pembentuk kedua yang mendominasi dengan luas 1375 Ha, formasi ini terdiri dari batu lempung, batu lanau dan batu bara, lignit dan kolongmerat. Formasi lainnya adalah formasi meliat yang terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung dan serpihan.

**Tabel II-7**  
**Formasi Geologi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

No.	Formasi	Luas (Ha)
1	Formasi Saju	1.375
2	Formasi Meliat	460
3	Formasi Tabul	2.936
<b>Jumlah</b>		<b>4.771</b>

*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)*



**Gambar II-5**

**Peta Formasi Geologi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

*Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034*

### 2.1.6 Hidrologi

Kondisi hidrologi kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara termasuk dalam daerah air tanah langka/tak berarti. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini tidak memiliki sumber air tanah dalam, kondisi air tanah dalam ini terkait dengan jenis tanah dan kondisi geologi yang ada di kawasan sebatik tengah.

### 2.1.7 Penggunaan Lahan

Jika dilihat dari tutupan lahannya, penggunaan lahan dari kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara sebagian besar merupakan lahan kebun campur, dan perkebunan, disusul guna lahan hutan dan permukiman. Komoditas perkebunan yang ada di kebun campur di kawasan ini berupa kelapa sawit, kakao, pisang dan beberapa buah lainnya. Penggunaan lahan permukiman terdapat di beberapa titik yang tersebar di jalan lokal kecamatan.

## 2.2. Perekonomian Wilayah

### 2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

PDRB ADHK Berdasarkan PDRB atas harga konstan, kontribusi PDRB didominasi oleh sektor Pertambangan yang kontribusinya hingga mencapai 6.551,14 milyar (41,7%), pertanian sebesar 4.118,37 milyar (26,3%) serta sektor Industri pengolahan / manufacturing sebesar 1.218,74 milyar (7,8%) dan sektor Konstruksi sebesar 1.118,94 milyar (7,1%). Data selengkapnya dapat dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nunukan (miliar rupiah), 2016–2020.

Pada tahun 2020, nominal PDRB ADHK berada pada level 15,70 triliun rupiah menurun sebesar 160 miliar rupiah dibandingkan tahun 2019 atau tumbuh sebesar -0,96 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan PDRB tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan pada pembahasan sebelumnya, peningkatan PDRB lebih dipicu oleh meningkatnya komponen net ekspor. Sebagai salah satu daerah utama penghasil batubara, rumput laut, dan kelapa sawit, peran komponen

ekspor sangat dominan dalam struktur PDRB Pengeluaran Nunukan, meskipun penggunaan barang dan jasa asal impor juga relatif besar. Peran komponen net ekspor dalam struktur PDRB ADHK 2020 mencapai 55,19 persen, paling tinggi dari seluruh komponen pengeluaran.

Tabel II-8.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nunukan (miliar rupiah), 2016–2020

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019 <sup>x</sup>	2020 <sup>xx</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3 134,93	3 398,24	3 670,98	3 928,98	4 118,37
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5 828,64	6 185,56	6 532,39	6 930,45	6 551,14
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1 135,84	1 176,06	1 181,21	1 234,84	1 218,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,75	4,01	4,42	4,71	5,34
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,90	7,27	7,55	7,74	8,17
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	860,69	934,25	1 016,84	1 113,74	1 118,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	704,55	766,11	824,39	893,91	899,75
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	271,21	290,09	313,72	338,25	333,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	133,37	145,91	162,48	176,10	172,89
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	270,69	294,45	319,29	347,61	369,36
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>13 088,62</b>	<b>13 976,75</b>	<b>14 854,59</b>	<b>15 856,65</b>	<b>15 703,77</b>

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019 <sup>x</sup>	2020 <sup>xx</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	45,06	47,38	51,03	53,22	53,35
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	76,50	79,05	83,84	88,60	89,29
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,17	5,25	5,38	5,49	5,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	368,24	385,79	410,31	441,48	445,90
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	184,43	194,91	204,62	220,77	236,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	3,35	3,56	3,79	4,07	4,53
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	55,31	58,87	62,35	66,69	72,67
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>13 088,62</b>	<b>13 976,75</b>	<b>14 854,59</b>	<b>15 856,65</b>	<b>15 703,77</b>

Catatan/Note: <sup>x</sup>Angka Sementara/Preliminary Figures

<sup>xx</sup>Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

### 2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per-kapita Kabupaten Nunukan menunjukkan peningkatan mulai tahun 2015 sampai tahun 2020 yaitu sebesar Rp 120,35 juta dimana pada tahun 2016 sebesar Rp 88,96 juta. Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara “riil” dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2016 pertumbuhan PDRB per-kapita mengalami kontraksi 0,78 persen, meningkat menjadi sebesar 2,43 persen di tahun 2017, kemudian melambat menjadi 1,96 persen di tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 2,52 di tahun berikutnya. Tahun 2020 mengalami kontraksi di tahun 2020 yaitu sebesar 4,86 persen.

### 2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Tanaman perkebunan yang paling luas di Kecamatan Sebatik Tengah adalah perkebunan Kelapa Sawit (3.490 ha) dan Kakao (956 ha). Perkebunan lainnya dengan luasan yang tidak terlalu besar adalah perkebunan Kelapa (20,50 ha), Karet (4 ha), Kopi (9,50 Ha),

Lada (11 ha) dan cengkeh seluas 5 ha. Data selengkapnya pada Tabel 9 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Sebatik Tengah (ha), 2017– 2019 Kelapa Sawit bahkan menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan karena kenaikan produksi yang signifikan sepanjang tahun 2017-2019 sebagaimana terlihat pada

**Tabel II-9**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Perkapita Kabupaten Nunukan, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Nilai PDRB (Miliar Rp)</b>					
- ADHB	16 501,99	20 040,90	22 576,03	25 431,08	26 298,89
- ADHK 2010	13 088,62	13 976,75	14 854,59	15 856,65	15 703,77
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	3,63	6,79	6,28	6,75	-0,96
<b>PDRB perkapita (Ribu Rp)</b>					
- ADHB	88 960,02	103 629,45	111 994,82	121 145,39	120 353,90
- ADHK 2010	70 558,98	72 272,36	73 690,42	75 535,90	71 866,54
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	(0,78)	2,43	1,96	2,50	-4,86
Jumlah penduduk (org)	185 499	193 390	201 581	209 922	218 513
Pertumbuhan	4,44	4,25	4,24	4,14	4,09

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

### 2.3. Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya serata Sumberdaya Manusia

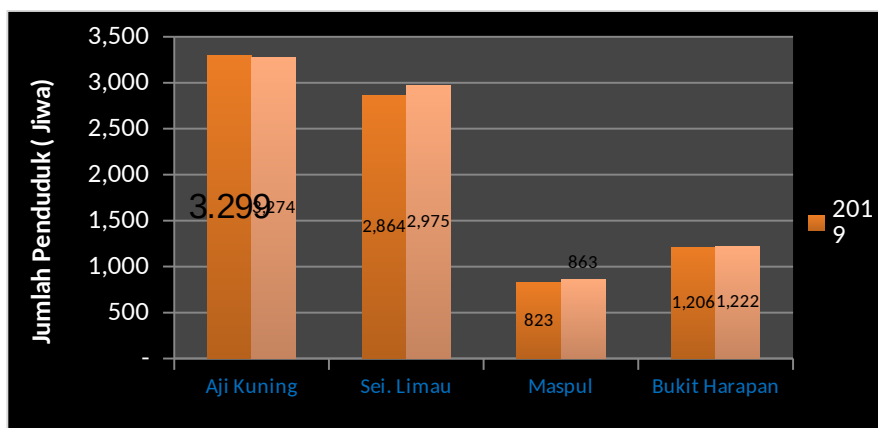
#### 2.3.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan data dari Statistik Daerah, Kecamatan Sebatik Tengah dalam angka dan profil Kecamatan Sebatik Tengah, jumlah penduduk kawasan perdesaan perkebunan diperbatasan negara Kabupaten Nunukan tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,7% yaitu 8.192 jiwa tahun 2019 menjadi 8.334 jiwa tahun 2020. Pada tahun 2020 desa dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Desa Aji Kuning dengan jumlah penduduk 3.274 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Desa Maspul dengan jumlah penduduk 863 jiwa. Berikut jumlah dan sebaran penduduk di Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara tahun 2019-2020 dirinci setiap desa.

**Tabel II-10**  
**Jumlah dan Sebaran Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2019-2020**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Sebaran Penduduk (%)	
		2019	2020	2019	2020
1	Aji Kuning	3.299	3.274	40 %	39 %
2	Sungai Limau	2.864	2.975	35 %	36 %
3	Maspul	823	863	10 %	10 %
4	Bukit Harapan	1.206	1.222	15 %	15 %
<b>Jumlah</b>		<b>8.192</b>	<b>8.334</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020



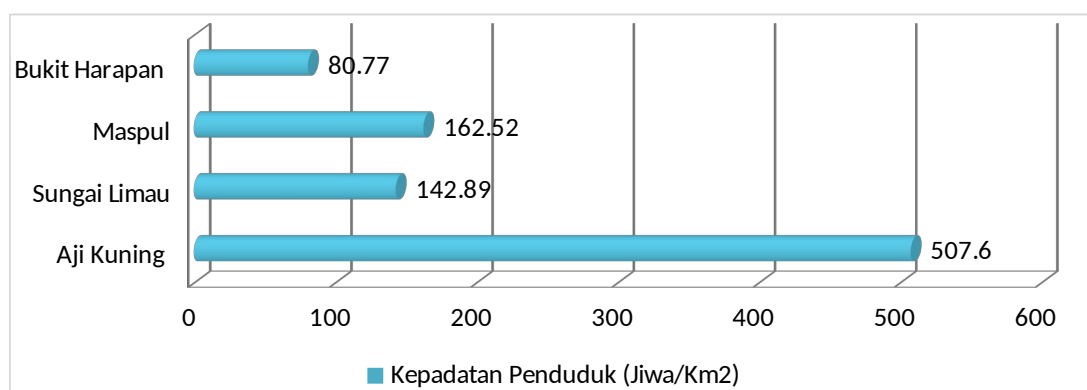
**Gambar II-6**  
**Grafik Jumlah Penduduk Kawasan Perdesaan**  
**Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2019-2020**  
*Sumber: Analisis, 2020*

Kepadatan penduduk di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 mencapai 174,68 jiwa/km<sup>2</sup>, artinya dalam 1 km<sup>2</sup> terdapat sekitar 175 jiwa. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Aji Kuning dengan kepadatan mencapai 507,59 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan desa dengan kepadatan penduduk terendah ada di Desa Maspul dengan kepadatan 162,52 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut data kepadatan penduduk menurut desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tahun 2020.

**Tabel II-11**  
**Kepadatan Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan**  
**di Perbatasan Negara Tahun 2020**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Aji Kuning	3.274	6,45	507,60
2.	Sungai Limau	2.975	20,82	142,89
3.	Maspul	863	5,31	162,52
4.	Bukit Harapan	1.222	15,13	80,77
<b>Jumlah</b>		<b>8.334</b>	<b>47,71</b>	<b>893,78</b>

*Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020*



**Gambar II-7**  
**Grafik Kepadatan Penduduk Menurut Desa Kawasan Perdesaan**  
**Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020**  
*Sumber: Analisis, 2020*

### 2.3.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk yang akan dibahas dalam analisis Kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara Kabupaten Nunukan ini terdiri dari analisis jumlah penduduk menurut desa dan jenis kelamin, analisis jumlah penduduk berdasarkan struktur umur, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tahun 2020 mencapai 8.334 jiwa dengan komposisi jumlah laki-laki 4.321 jiwa dan jumlah perempuan 4.013 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin untuk kawasan ini sebesar 107,68 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. Berikut data lengkap jumlah penduduk menurut desa dan jenis kelamin di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tahun 2020.

**Tabel II-12**  
**Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin**  
**Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020**

No	Desa	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Aji Kuning	710	1,564	3,274	45,37
2.	Sungai Limau	1,547	1,428	22,975	108,33
3.	Maspul	443	420	863	105,48
4.	Bukit Harapan	621	601	1,222	103,32
<b>Jumlah</b>		<b>4,321</b>	<b>4,013</b>	<b>8,334</b>	<b>107,68</b>

Sumber : Profil Desa 2020

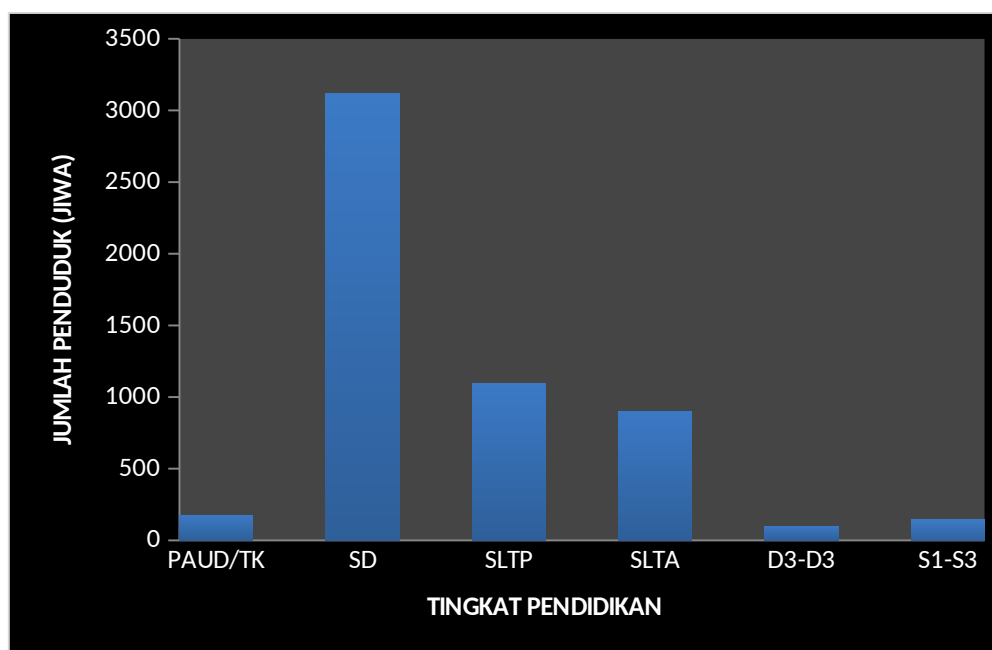
### 2.3.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD yaitu mencapai 56,50% atau sebanyak 3.117 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan S1-S3 hanya mencapai 2,64% atau sebanyak 146 jiwa, dan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan D1-D3 hanya mencapai 1,70% atau sebanyak 94 jiwa. Jumlah ini memperlihatkan bahwa masyarakat perdesaan sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan sampai jenjang tertinggi, walaupun jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan dibawahnya. Berikut data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di kawasan perdesaan tahun 2020.

**Tabel II-13**  
**Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kawasan Perdesaan**  
**Perkebunan di Perbatasan Negara Periode Juli Tahun 2020**

No	Nama Desa	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		PAUD / TK	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	S1-S3	
1.	Aji Kuning	63	1,299	536	436	61	63	2.458
2.	Sungai Limau	57	670	216	191	17	29	1.175
3.	Maspul	31	474	169	117	2	18	811
4.	Bukit Harapan	19	674	171	158	14	36	072
<b>Jumlah</b>		<b>170</b>	<b>3,117</b>	<b>1,092</b>	<b>902</b>	<b>94</b>	<b>146</b>	<b>5,516</b>

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020



Gambar II-8

Grafik Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode Oktober Tahun 2020

Sumber: Analisis, 2020

Struktur umur di Kawasan perdesaanperkebunan di perbatasan negara Kabupaten Nunukan didominasi oleh kelompok umur 18–44 tahun yaitu mencapai 3.653 jiwa, sedangkan kelompok umur 00–05 tahun jumlah penduduknya paling sedikit yaitu 824 jiwa. Jumlah data dibawah belum kuat untuk mengidentifikasi jenis struktur umur kawasan karena kelompok umur memiliki jenjang tahun yang tidak seimbang dan kurang rinci. Namun kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara inijika dilihat secara umum cenderung mengarah ke struktur muda karena jumlah kelompok penduduk yang berumur kurang dari 17 tahun jumlahnya 24,82% yaitu 2.069 jiwa dan penduduk yang lebih dari 45 tahun hanya mencapai 21,45% atau sebanyak 1.788 jiwa. Berikut data jumlah penduduk menurut desa dan kelompok umur di kawasan perdesaan tahun 2020.

Tabel II-14

Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode Juli Tahun 2020

No.	Nama Desa	Kelompok Umur (Tahun)				Jumlah
		00 – 05	06 - 17	18 - 44	45 ke atas	
1.	Aji Kuning	296	824	1,465	689	3,274
2.	Sungai Limau	324	779	1,227	645	2,975
3.	Maspul	80	169	416	198	863
4.	Bukit Harapan	124	297	545	256	1,222
<b>Jumlah</b>		<b>824</b>	<b>2,069</b>	<b>3,653</b>	<b>1,788</b>	<b>8,334</b>

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020

Human capital sangat berperan dalam ekonomi terutama di bidang pendidikan, karena permintaan tenaga kerja sangat membutuhkan keahlian tenaga kerja. Menurut hasil penelitian Sugiharso dan Suahasil (2004) menunjukkan bahwa dampak pendidikan meningkatkan penghasilan dan ekerja overeducated berpengaruh signifikan terhadap penghasilan pekerja meskipun telah dikontrol oleh usia, jenis kelamin, jam kerja serta karakteristik individu lainnya.

Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Nunukan mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD sederajat atau dibawahnya, tercatat 42,52 persen. Pendidikan Perguruan Tinggi Sederajat masih merupakan bagian terkecil dari penduduk bekerja, yakni 13,23 persen pada tabel 15.

**Tabel II-15**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ SD	44,79	37,53	42,52
SMP Sederajat	16,59	15,38	16,21
SMA/K/Sederajat	28,16	27,75	28,03
Diploma/Universitas	10,46	19,33	13,23
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang bekerja yang mempunyai tingkat pendidikan perguruan tinggi (Diploma/Universitas) yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya persentase perempuan bekerja yang berpendidikan Diploma/universitas yang mencapai 19,33 persen, sedangkan pada laki-laki sekitar 10,46 persen.

**Tabel II-16**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Klasifikasi Daerah di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ SD	39,05	45,50	42,52
SMP Sederajat	17,30	15,28	16,21
SMA/K/Sederajat	28,20	27,89	28,03
Diploma/Universitas	15,45	11,33	13,23
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Bila diamati menurut tipe daerah, persentase penduduk yang bekerja di daerah perdesaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya persentase penduduk daerah perdesaan berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 45,50 persen, sedangkan di daerah perkotaan sekitar 39,05 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan karena di daerah perdesaan untuk mendapatkan pekerjaan cenderung tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi.

Selain itu kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan mereka yang berada di perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan di perdesaan.

#### 2.3.4. Angkatan Kerja

Angkatan kerja pada dasarnya merujuk pada kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam hal ini terdiri dari mereka yang bekerja dan menganggur.

**Tabel II-17**  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020

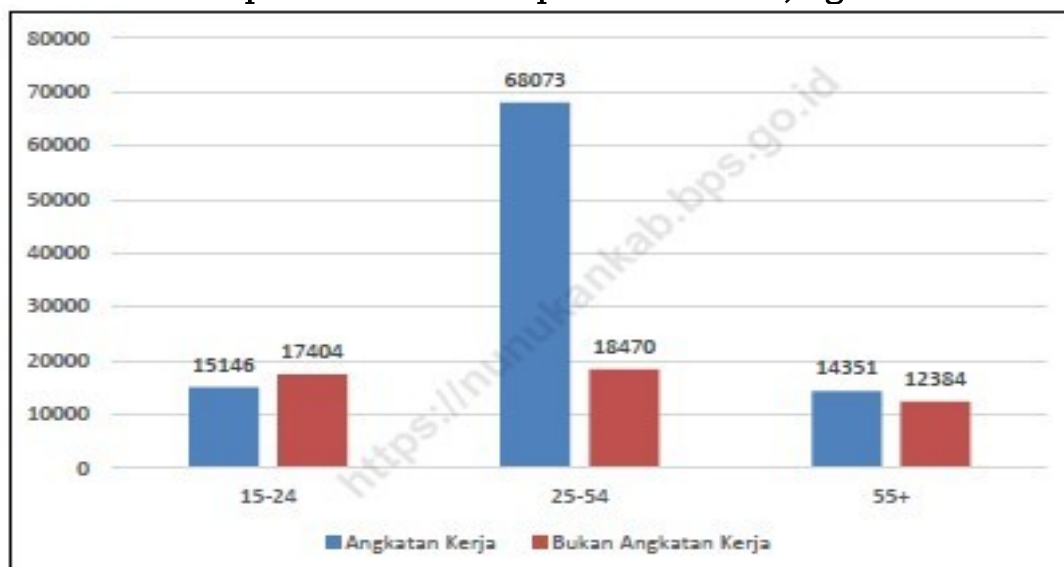
Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	79 279	66 549	65 712	80 116	145 828
	54,37	45,63	45,06	54,94	100,00
Angkatan Kerja	66 761	30 809	46 055	51 515	97 570
	68,43	31,57	47,20	52,80	100,00
Bukan Angkatan Kerja	12 518	35 740	19 657	28 601	48 258
	25,94	74,06	40,73	59,27	100,00

Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Jumlah angkatan kerja di Nunukan pada tahun 2019 sebesar 98.891 jiwa, dan pada tahun 2020 menjadi sekitar 97.570 jiwa. Jadi selama kurun waktu 2019–2020 terjadi pengurangan jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja sebesar 1.321 jiwa. Terdapat perbedaan yang cukup menyolok pada jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin, dimana jumlah angkatan kerja laki-laki 2 kali lebih banyak dibandingkan angkatan kerja perempuan. Dari Tabel 7. dapat dilihat, angkatan kerja laki-laki sejumlah 66 ribu jiwa (68,43 persen) sedangkan angkatan kerja perempuan berjumlah 30 ribu jiwa atau sekitar 31,57 persen dari total angkatan kerja. Selama kurun waktu 2019–2020 jumlah angkatan kerja laki-laki mengalami penurunan sebesar 162 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja pada perempuan mengalami penurunan sebesar 1.159 jiwa.

Menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa jumlah dan persentase angkatan kerja di perdesaan lebih besar dibanding dengan jumlah dan persentase angkatan kerja di perkotaan. Tercatat pada Tabel 7, untuk daerah perdesaan terdapat sekitar 51 ribu orang angkatan kerja atau sekitar 52,80 persen, sedangkan di perkotaan terdapat sekitar 46 ribu orang angkatan kerja atau sekitar 47,20 persen dari total angkatan kerja. Review: Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Nunukan

**Gambar II-9.**  
**Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) Menurut Jenis Kegiatan dan Kelompok Umur di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**



Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Selanjutnya bila diamati menurut kelompok umur, persentase terbesar dari angkatan kerja berada pada kelompok umur 25–54 tahun yang mencapai 69,77 persen. Sedangkan pada kelompok umur 15–24 tahun terdapat sekitar 15,52 persen dari total angkatan kerja dan 14,71 persen berumur 55 tahun ke atas. Keadaan ini didasarkan pada kondisi bahwa untuk penduduk usia kerja berumur 15–24 tahun, dimungkinkan cenderung masih melanjutkan pendidikan sehingga sedikit yang masuk dalam golongan angkatan kerja, sedangkan penduduk usia kerja berumur 55 tahun ke atas dimungkinkan sudah merupakan usia pensiun dan tidak bekerja lagi sehingga sedikit yang masuk dalam golongan angkatan kerja.

Tabel 18 memberikan informasi bahwa dari 93 ribu penduduk Nunukan usia 15 tahun ke atas yang bekerja, sekitar 70,43 persennya merupakan penduduk berusia 25–54 tahun, 15,27 persen merupakan penduduk usia tua yang seharusnya telah memasuki masa purna bakti/pensiun namun masih bekerja dan sekitar 14,30 persen merupakan penduduk usia 15–24 tahun. Faktor ekonomi diduga berperan dalam meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja pada usia sekolah maupun usia pensiun.

**Tabel II-18**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**

Uraian	Kelompok Umur			Total
	15 – 24	25 – 54	55 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bekerja	13 374	65 879	14 279	93 532
Persentase	14,30	70,43	15,27	100,00

Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Penduduk usia 25–54 tahun di Nunukan yang mempunyai kegiatan bekerja sebesar 76,12 persen (Tabel 8). Sedangkan sisanya sebesar 23,88 persen termasuk sebagai kategori pengangguran dan bukan angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase

penganggur yang berusia 25–54 tahun paling sedikit dibanding kelompok umur lainnya. Rendahnya persentase kelompok umur 25–54 tahun yang menganggur, dimungkinkan karena pada usia tersebut kebanyakan sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Namun, pekerjaan apapun bisa saja mereka geluti termasuk jenis pekerjaan kasar, sebab pada umur itu kebanyakan sudah berkeluarga dan mereka dihadapkan pada tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya.

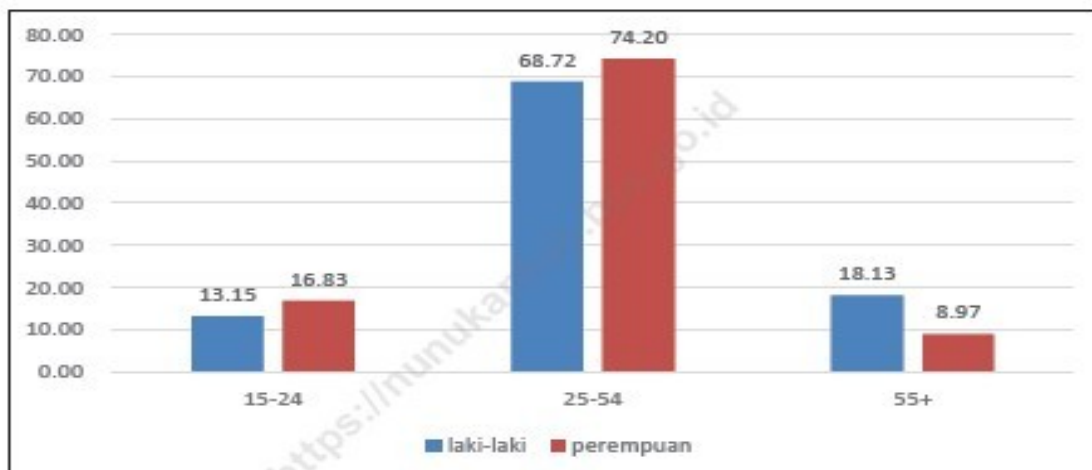
**Tabel II-19.**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**

Uraian	Kelompok Umur			Total
	15 – 24	25 – 54	55 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	32 550	86 543	26 735	145 828
Bekerja	13 374	65 879	14 279	93 532
Presentase Bekerja	41,09	76,12	53,41	64,14

Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Fakta lain yang menarik untuk dikaji lebih jauh berkaitan dengan Tabel 19 di atas adalah penduduk pada kelompok umur 15–24 tahun merupakan penduduk usia sekolah yang seharusnya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan jangka panjang remaja itu sendiri, karena banyak di antara mereka yang tidak punya kemampuan kerja. Ada beberapa latar belakang mengapa kelompok itu ikut terjun ke pasar kerja, antara lain membantu pekerjaan/usaha orang tua atau yang disebut sebagai pekerja keluarga, adanya kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia kerja. Demikian halnya pada kelompok usia tua, yang seharusnya telah memasuki masa pensiun, namun dari hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan lebih dari separuh atau sekitar 53,41 persen dari total penduduk usia kerja kelompok umur 55 tahun ke atas yang masih bekerja.

**Gambar II-10**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**



Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

**Tabel II-20.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 – 24	13,15	16,83	14,30
25 – 54	68,72	74,20	70,43
55+	18,13	8,97	15,27
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020*

### 2.3.5. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten Nunukan. TPT di Nunukan pada Agustus 2020 tercatat sebesar 4,14 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih rendah dari pada TPT laki-laki, tercatat masing-masing sebesar 3,07 persen dan 5,09 persen. Berdasarkan tipe daerah terlihat bahwa TPT untuk daerah perkotaan sekitar 6,34 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT daerah perdesaan yang tercatat sebesar 2,17 persen sebagai efek dari industrialisasi. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini terutama terjadi di daerah dimana antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak seimbang.

**Tabel II-21.**  
**Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka dan TPT Kabupaten Nunukan Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Daerah, Agustus 2020**

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	66 761	30 809	46 055	51 515	97 570
Pengangguran	2 471	1 567	2 921	1 117	4 038
TPT	3,70	5,09	6,34	2,17	4,14

*Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020*

### 2.3.6. Pekerja Menurut Lapangan Usaha

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, di samping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah.

**Gambar II-11**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Nunukan, Agustus 2020**

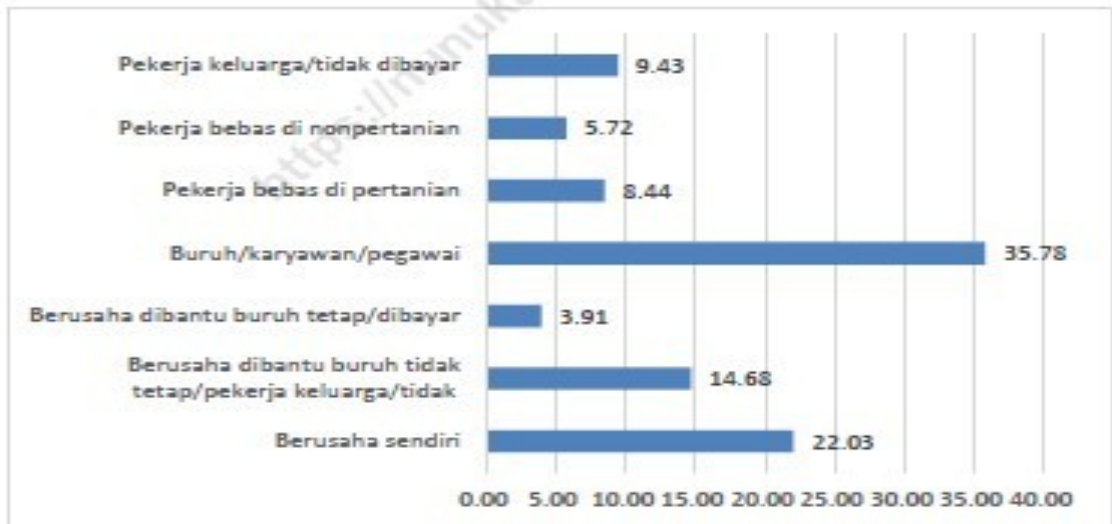


Gambar 11 menggambarkan bahwa lapangan usaha pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja di Nunukan. Pada periode Agustus 2020, penyerapan sektor ini mencapai sekitar 44,89 persen kemudian disusul oleh sektor jasa sekitar 44,52 persen dan sektor manufaktur sekitar 10,59 persen. Sektor yang paling kecil dalam Penyerapan tenaga kerja menurut sektoral kadang kala menggambarkan kinerja sektor secara ekonomis yang diukur dari penciptaan nilai tambah bruto (PDRB) oleh tenaga kerja yang terserap pada masing-masing sektor. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak tentu saja akan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Tetapi di sisi lain juga terjadi fenomena bahwa sektor yang lebih bersifat tradisional dan konvensional akan lebih ramah terhadap penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor yang dikelola secara lebih modern.

### 2.3.7. Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan bagi ketenagakerjaan. penduduk yang bekerja. Status pekerjaan bagi buruh/karyawan/pegawai merupakan bagian terbesar dari status pekerjaan penduduk di Nunukan pada periode Agustus 2020 sebesar 35,78 persen dari total pekerja. Selain sebagai buruh/karyawan/pegawai, bagian yang besar lainnya adalah berstatus berusaha sendiri yang mencapai 22,03 persen, berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar sebesar 14,68 persen dan status pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 9,43 persen.

**Gambar II-12**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut**  
**Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Nunukan, Agustus 2020**

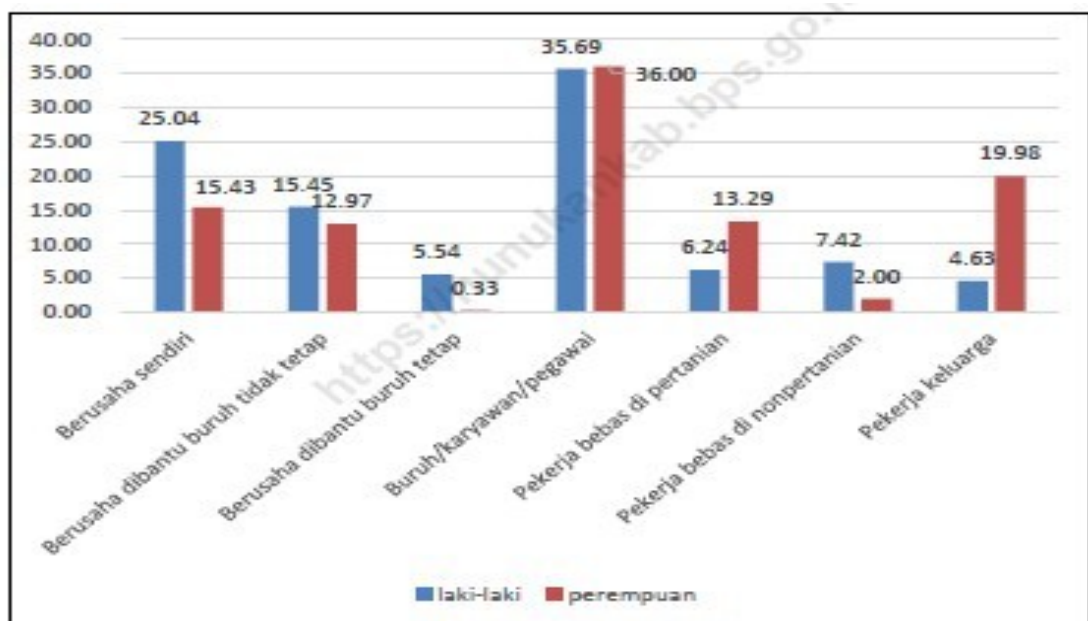


Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

Persentase pekerja yang berstatus buruh/pegawai/karyawan mendominasi baik untuk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2020. Kondisi pada tahun 2020, baik laki-laki maupun perempuan cenderung bekerja sebagai buruh/karyawan, masing-masing sebesar 35,69 persen dan 36,00 persen (Gambar 5). Status pekerjaan lain yang cukup mendominasi adalah berusaha sendiri, berdasarkan jenis kelamin proporsi untuk perempuan cenderung lebih rendah yaitu sekitar 15,43 persen dibandingkan dengan laki-laki dengan status pekerjaan yang sama yaitu sekitar 25,04 persen. Namun sebaliknya, untuk status pekerjaan pekerja keluarga/tidak dibayar yang secara ekonomi tidak mendapatkan imbalan jasa, perempuan lebih mendominasi, yakni sekitar 19,98 persen dan untuk laki-laki sekitar 4,63 persen.

Status pekerja keluarga/tidak dibayar kemungkinan besar tidak memiliki kondisi pekerjaan yang layak, jaminan sosial yang memadai atau mempunyai suara dalam serikat pekerja.

**Gambar II-13**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja**  
**Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten**  
**Nunukan, Agustus 2020**



Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Agustus 2020

## 2.4. Sarana dan Prasarana

### 2.4.1. Sarana Perekonomian dan Perdagangan

Sarana perekonomian dan perdagangan yang terdapat di Kecamatan Sebatik Tengah antara lain 6 Bank Pemerintah, 1 Koperasi, serta pasar. Data berikut menyajikan banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi menurut Kelurahan/Desa dan Jenisnya di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019.

Tabel II-22

Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan yang Beroperasi menurut Kelurahan/Desa dan Jenisnya di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Bank Umum Pemerintah <i>Government Bank</i>	Bank Umum Swasta <i>Private Bank</i>	Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural Bank</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Aji Kuning	2	-	-
Bukit Harapan	1	-	-
Maspul	1	-	-
Sungai Limau	2	-	-
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel II-23

Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi menurut Kelurahan/Desa dan Jenisnya di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Complex</i>	Pasar dengan Bangunan Permanen <i>Market in Permanent Building</i>	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen <i>Market without Semi-Permanent Building</i>	Pasar Tanpa Bangunan <i>Market without Permanent Building</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aji Kuning	-	-	1	1
Bukit Harapan	-	-	1	-
Maspul	-	1	-	-
Sungai Limau	-	1	-	-
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	Minimarket / Swalayan <sup>2</sup> <i>Minimarket/ Supermarket<sup>2</sup></i>	Toko/Warung Kelontong <i>Shop/ Grocery Store</i>	Restoran/ Rumah Makan <i>Restaurant/ Food Stall</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Aji Kuning	-	20	3
Bukit Harapan	-	8	-
Maspul	-	5	-
Sungai Limau	-	7	-
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>3</b>

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	Warung/Kedai Makanan Food & Beverage Store	Hotel Hotel	Hostel/Motel/ Losmen/Wisma Hostel/ Motel/ Inn/ Pensions
(1)	(2)	(3)	(4)
Aji Kuning	2	-	-
Bukit Harapan	-	-	-
Maspul	-	-	-
Sungai Limau	-	-	-
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 2.4.2. Sarana dan Prasarana Transportasi

Jalur transportasi utama yang digunakan dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kabupaten Nunukan adalah jalur darat menggunakan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, sedangkan untuk mengakses Ibu Kota Kabupaten Nunukan menggunakan jalur darat menuju pelabuhan di Sebatik Barat kemudian menggunakan perahu bermotor dengan waktu tempuh sekitar 35 menit. Akses menuju Tawau Malaysia dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan perahu bermotor. Sarana transportasi antar desa masih sangat susah karena moda angkutan masih terbatas, tidak ada trayek atau jalur angkut dan waktu yang tetap setiap harinya, bagi pendatang dapat menyewa kendaraan untuk menuju kawasan perdesaan. Kondisi jalan di kawasan perdesaan sebagian besar jalan umum kabupaten sudah beraspal khususnya di Desa Sungai Limau dan Aji Kuning, sementara di Desa Maspul kondisi jalan yang beraspal hanya sekitar 1,5 Km dan di Desa Bukit Harapan belum ada jalan yang beraspal. Jalan lokal dan alternatif antar desa masih banyak yang belum beraspal, hanya berupa perkerasan batu dan semen. Tingkat kebutuhan masyarakat yang penting adalah infrastruktur jalan dan jembatan untuk sarana penghubung dalam mempermudah pergerakan masyarakat dan hasil produksi perkebunan.

Tersedianya prasarana jalan menuju ke daerah-daerah produksi pertanian akan menunjang peningkatan produksi komoditas pertanian, yang selanjutnya dipasarkan ke daerah perkotaan. Pengangkutan pemasaran komoditas pertanian dari daerah produksi ke daerah-daerah pasar yang tersebar dapat dilaksanakan secara lancar, volume penjualan bertambah besar, pendapatan dan keuntungan petani produsen akan meningkat. Keuntungan petani meningkat akan menunjang pengembangan kegiatan usaha di bidang lainnya, seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengembangan berbagai kegiatan usaha di sektor lainnya yang semakin meningkat merupakan dampak multiplier yang berlangsung secara terus menerus. Demikian pula, tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang cukup dan berkapasitas akan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan diberbagai sektor diluar sektor transportasi.

Berdasarkan tingkat kewenangannya, di Kab. Nunukan terdapat 276,57 km jalan negara, 215,45 km jalan provinsi dan 1.346,52 km jalan kabupaten/kota. Data lengkap dapat dilihat pada Tabel 24. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Nunukan (km), 2018–2020.

**Tabel II-24**  
**Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di**  
**Kabupaten Nunukan (km), 2018–2020**

<b>Tingkat Kewenangan Pemerintahan</b> <i>Level of Government Authority</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara <sup>2</sup> /State <sup>2</sup>	276,57	276,57	276,57
Provinsi/Province	215,45	215,45	215,45
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	1 088,69	1 132,89	1 364,50
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 580,71</b>	<b>1 624,91</b>	<b>1 856,52</b>

Catatan/Note: <sup>1</sup> Data tidak termasuk panjang jalan tol/Excluding toll road

<sup>2</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015/Based on Public Work and Public Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/2015

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan/Public Works Office of Nunukan Regency

Sementara berdasarkan jenis permukaan, baru terdapat 226,70 km jalan dengan permukaan aspal. Selebihnya adalah jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 291,25 km dan sebagian besar jalan masih dalam kondisi alam berupa tanah sepanjang 846,55 km. Tabel 25 memperlihatkan panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Nunukan (km), 2018–2020.

**Tabel II-25**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten**  
**Nunukan (km), 2018–2020**

<b>Jenis Permukaan Jalan</b> <i>Type of Road Surface</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/Paved	214,30	221,99	226,70
Kerikil/Gravel	273,02	287,91	291,25
Tanah/Soil	601,36	622,99	846,55
Lainnya/Others	-	-	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 088,69</b>	<b>1 132,89</b>	<b>1 364,50</b>

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan/Public Works Office of Nunukan Regency

Dari kondisinya, hanya sebagian kecil jalan dalam kondisi baik sepanjang 450,86 km atau 33%. Sisanya sebanyak 67% berada dalam kondisi yang sedang, rusak atau rusak berat dengan perincian sepanjang 291,55 km (21,4%) berada dalam kondisi sedang; 425,95km atau 31,2% berada dalam kondisi rusak dan 196,14 km atau 14,4% dalam kondisi rusak berat. Lampiran Tabel 26. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nunukan (km), 2018–2020.

**Tabel II-26**  
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nunukan (km),**  
**2018–2020**

<b>Kondisi Jalan</b> <i>Condition of Roads</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik/ <i>Good</i>	608,79	616,01	450,86
Sedang/ <i>Moderate</i>	230,38	281,46	291,55
Rusak/ <i>Damage</i>	249,52	119,46	425,95
Rusak Berat/ <i>Severely Damage</i>	-	115,97	196,14
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 088,69</b>	<b>1 132,89</b>	<b>1 364,50</b>

Sumber/*Source*: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan/*Public Works Office of Nunukan Regency*

Di Kecamatan Sebatik Tengah sendiri, rata-rata jalan darat yang dibangun merupakan jalan dengan jenis permukaan aspal atau beton yang dapat dilalui Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 27.

**Tabel II-27**  
**Kondisi Jalan Darat Antar Desa/Kelurahan menurut**  
**Kelurahan/Desa di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019**

<b>Kelurahan/Desa</b> <i>Kelurahan/Village</i>	<b>Jenis Permukaan Jalan</b> <i>Type of Road Surface</i>	<b>Dapat Dilalui Kendaraan</b> <b>Bermotor Roda 4 atau Lebih</b> <i>Can be Passed by Four or More</i> <i>Wheel Vehicle</i>
(1)	(2)	(3)
Aji Kuning	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
Bukit Harapan	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
Maspul	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun
Sungai Limau	Aspal/Beton	Sepanjang Tahun

Untuk angkutan umum, di keseluruhan desa di dalam kawasan terdapat angkutan umum sebagaimana data Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019 pada Tabel 28 dibawah.

**Tabel II-28**  
**Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan menurut**  
**Kelurahan/Desa di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019**

<b>Kelurahan/Desa</b> <i>Kelurahan/Village</i>	<b>Jenis Transportasi</b> <i>Type of Transportation</i>	<b>Keberadaan Angkutan Umum</b> <i>Availability of Public Transportation</i>
(1)	(2)	(3)
Aji Kuning	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
Bukit Harapan	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
Maspul	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
Sungai Limau	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap

**2.4.3. Sarana Telekomunikasi**

Sarana telekomunikasi terutama telekomunikasi internet cukup baik di Kec. Sebatik Tengah, ditandai dengan adanya 4 Menara Telepon Seluler (BTS) dengan Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Yang Menjangkau di Desa/Kelurahan dengan sinyal telepon seluler yang pada umumnya kuat. Berikut adalah data jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019 pada Tabel 29.

**Tabel II-29**  
**Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler**  
**Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler menurut Kelurahan/Desa di**  
**Kecamatan Sebatik Tengah, 2019**

<b>Kelurahan/Desa</b> <i>Kelurahan/Village</i>	<b>Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS)</b> <i>Number of Base Transceiver Station (BTS)</i>	<b>Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Yang Menjangkau di Desa/Kelurahan</b> <i>Number of Cellular Communication Service Operators Reaching Village/ Kelurahan</i>	<b>Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah Desa/Kelurahan</b> <i>Cellular Phone Signal Condition in Majority of Village/Kelurahan Area</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Aji Kuning	1	4	Kuat
Bukit Harapan	-	4	Kuat
Maspul	1	4	Kuat
Sungai Limau	2	4	Kuat

#### 2.4.4. Sarana Energi

Listrik PLN sudah menjangkau kecamatan Sebatik Tengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan PLN di Kec. Sebatik Tengah yang mencapai 1.311 pelanggan pada tahun 2020. Lampiran Tabel 30 menyajikan data Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2016–2020.

**Tabel II-30**  
Data Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2016–2020

Kecamatan Subdistrict	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sebatik	710	803	1 074	1 211	1 450
Sebatik Timur	1 395	1 488	1 881	2 087	3 413
Sebatik Tengah	523	573	830	976	1 311
Sebatik Utara	1 328	1 401	1 804	1 974	2 026
<b>Kabupaten Nunukan</b>	<b>21 005</b>	<b>22 752</b>	<b>28 273</b>	<b>30 945</b>	<b>38 693</b>

Di tingkat desa di dalam kawasan, secara keseluruhan sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN sesuai dengan data dalam Kecamatan Dalam Angka 2010. Selain listrik PLN, di Desa Bukit Harapan sebagian kecil menggunakan listrik Non PLN. Data selengkapnya pada Tabel 31.

**Tabel II-31**  
Banyaknya Keluarga menurut Kelurahan/Desa dan Jenis Pengguna Listrik di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	Pengguna Listrik/Electric Customer			Bukan Pengguna Listrik Non Electricity Consuming Family
	PLN State Electricity Company	Non PLN Non-State Electricity Company	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aji Kuning	755	-	755	-
Bukit Harapan	157	71	228	50
Maspul	202	-	202	-
Sungai Limau	666	-	666	112
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	<b>1 780</b>	<b>71</b>	<b>1 851</b>	<b>162</b>

#### 2.4.5. Sarana dan Prasarana Air Bersih

Dalam penyediaan jaringan air minum di Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah telah membangun jaringan air bersih baik di kawasan-kawasan perkotaan ibukota kecamatan ataupun di wilayah pedesaan yang dianggap rentan terjadi kesulitan memperoleh air minum. Beberapa bantuan ataupun program telah digulirkan untuk membantu dan mempermudah masyarakat memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum dan lainnya, seperti air minum untuk pedesaan, program air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah, SPAM IKK untuk kawasan perkotaan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada disekitar permukiman atau desa seperti sungai dan mata air, bangunan penangkap dan jaringan perpipaan dibangun secara

sederhana untuk mengalirkan air dari sumbernya ke permukiman warga.

Sistem penyediaan air minum di Ibukota kabupaten yang dikelola oleh PDAM Nunukan telah terbentuk dan memberikan pelayanannya sewaktu wilayah Kabupaten Nunukan masih menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan, pada saat itu, masih berupa PDAM Bulungan Unit Nunukan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika terbentuknya otonomi baru, PDAM Nunukan pun menyesuaikan diri menjadi perusahaan daerah yang mengelola sistem penyediaan air minum di Kabupaten Nunukan.

Pelayanan PDAM Kabupaten Nunukan dimulai pada tahun 1981 semenjak dibangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pasir Putih berkapasitas 20 ltr/dtk dengan sumber air baku dari Sungai Bolong. Pada tahun 1997 dibangun IPA dengan kapasitas 10 ltr/dtk pada lokasi yang sama sehingga kapasitas total IPA Pasir Putih menjadi 30 ltr/dtk. Sistem penyediaan air minum di Kota Nunukan menggunakan jaringan perpipaan dengan sistem pengalirannya secara pemompaan dan gravitasi. Pada tahun 1999 dan 2002 dibangun IPA Sungai Bilal berkapasitas 15 ltr/dtk dan 10 ltr/dtk dengan sumber air baku berasal dari Sungai Bilal. Pada tahun 2007 dibangun IPA baru Sungai Bilal berkapasitas 25 ltr/dtk dengan sumber air baku berasal dari Sungai Bilal dan telah dimanfaatkan untuk melayani pelanggan PDAM di sebagian kawasan perkotaan Nunukan.

Beberapa sumber mata air yang terdapat di Kabupaten Nunukan, yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM, antara lain :

- Air Permukaan PDAM Nunukan terdapat beberapa aliran sungai besar dan kecil dan mata air yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan berfungsi sebagai drainase, dari beberapa sungai yang ada.
- Air Tanah Wilayah Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang dilalui oleh beberapa anak sungai yang turut mempengaruhi kondisi air permukaan. Kebutuhan air minum di daerah ini sebagian besar diperoleh dari sumur - sumur permukaan dan mata air dengan kedalaman antara 10 -12 meter yang kondisinya baik.

Pelayanan air minum dengan jaringan perpipaan di Kabupaten Nunukan masih sangat terbatas, khusus di kawasan perkotaan ibukota Kecamatan, jumlah SPAM IKK yang sudah terbentuk dan dikelola sebagai unit usaha baik PDAM ataupun Badan Usaha lainnya, baru tercatat 6 (enam) SPAM IKK yang ada dimasingmasing ibukota kecamatan, antara lain di Pulau Sebatik terdapat 2 (dua) SPAM IKK, di dataran Pulau Kalimantan dalam wilayah Kabupaten Nunukan tercatat 4 (empat) SPAM IKK.

Dari segi cakupan wilayah yang dilayani oleh PDAM Nunukan masih sangat minim, saat ini wilayah administrasi kecamatan yang ada berjumlah 15 kecamatan. Begitupula jumlah jiwa yang terlayani oleh PDAM Kabupaten Nunukan ± 30.714 jiwa atau 19,9% dari total jumlah penduduk Kabupaten sebesar 154.269 jiwa (BPS, Tahun 2012). Dalam table berikut diuraikan kondisi eksisting SPAM IKK yang dikelola oleh PDAM Nunukan.

**Tabel II-32**  
**Unit Produksi SPAM IKK Di Kabupaten Nunukan.**

No.	Unit Produksi	Jenis Air Baku	Kapasitas (L/Dtk)		Sumber Daya	Sistem Pendistribusian
			Terpasang	Produksi		
1	IPA Sei Pancang	Air Sumur Dalam (Bor)	5	3.6	PLN & GENSET	POMPA
2	IPA Aji Kuning	Air Sumur Dalam (Bor)	10	1.3	PLN & GENSET	POMPA & GRAVITASI
3	IPA Lumbis	Air Permukaan (Sungai)	10	5	GENSET	POMPA & GRAVITASI
4	IPA Siemanggaris	Air Permukaan (Mata Air)	5	5	GENSET	GRAVITASI
5	IPA Sembakung	Air Permukaan (Sungai)	5	5	GENSET	GRAVITASI & POMPA
6	IPA Sebuku	Air Permukaan (Sungai)	10	10	GENSET	GRAVITASI & POMPA
			45	29.9		

Sumber : Diolah dari Data PDAM Kabupaten Nunukan, Tahun 2013

Dilihat dari besaran kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi masing-masing unit yang ada, Nampak bahwa masih ada deviasi antara keduanya meskipun tidak besar. Salah satu penyebab rendahnya produksi adalah ketersediaan air baku khususnya pada unit produksi yang menggunakan sumber air baku air tanah dalam, seperti di IPA Sei Pancang dan IPA Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Utara dan Sebatik Timur.

Hingga tahun 2020, Kec. Sebatik Tengah belum mendapatkan penyaluran air PAM sebagaimana data Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2020 (Tabel 33).

**Tabel II-33**  
**Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2020**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Pelanggan <i>Number of Customers</i>	Air Disalurkan <i>Distributed Water</i> (m <sup>3</sup> )	Nilai <i>Value</i> (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sebatik Tengah	-	-	-
Sebatik Utara	1 115	225 402,05	1 117 766 381,15
<b>Kabupaten Nunukan</b>	<b>14 182</b>	<b>3 451 166,73</b>	<b>19 883 498 719,48</b>

Untuk Kecamatan Sebatik Tengah, selain ledeng dengan meteran, juga masih ada yang menggunakan air danau/sungai/embung untuk sumber air minumnya selain air hujan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 34.

**Tabel II-34**  
**Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Sebatik Tengah, 2014–2019**

Sumber Air Minum <i>Sources of Drinking Water</i>	2014	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan Bermerk/ <i>Branded Bottled Water</i>	-	-	-
Air Isi Ulang/ <i>Refill Water</i>	-	-	-
Ledeng dengan Meteran/ <i>Bottled Water/Tap Water</i>	-	2	-
Ledeng tanpa Meteran/ <i>Electric/ Hand Pump</i>	-	-	-
Sumur Bor atau Pompa/ <i>Borehole/ Tube Well</i>	-	-	-
Sumur/ <i>Well</i>	-	-	-
Mata Air/ <i>Spring</i>	-	-	-
Sungai/Danau/Kolam/ Waduk/Situ/Embung/Bendungan <i>River/Lake/Pool/Reservoir/Dam</i>	4	-	-
Air Hujan/ <i>Rain-water</i>	-	2	4
Lainnya/ <i>Others</i>	-	-	-

Embung Desa merupakan salah satu dari empat program prioritas dana desa. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta untuk pembangunan unit embung. Hingga tahun 2018 saja, sudah ada sekitar 3.000 unit embung desa yang dibangun. Manfaat embung desa yang paling utama adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan air dan meningkatkan volume hasil pertanian yang ada di desa termasuk pemenuhan kebutuhan air untuk peternakan yang sangat penting disamping untuk konservasi sumberdaya air yang semakin langka. Manfaat lainnya yaitu musim panen dapat bertambah hingga 2-3 kali lipat dari biasanya.

Saat desa sedang dilanda musim kemarau, masyarakat pun bisa menggunakan embung desa sebagai sumber air. Dan yang terakhir Embung Desa juga dapat digunakan untuk budidaya ekowisata dan perikanan.

Di Kecamatan Sebatik Tengah, terdapat 6 embung, yang berada di Desa Aji Kuning (1 buah) dan Desa Maspul (5 buah). Data tentang keberadaan embung dapat dilihat pada Tabel 35.

**Tabel II-35**  
**Banyaknya Embung Desa menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Sebatik Tengah, 2018 dan 2019**

Kelurahan/Desa <i>Kelurahan/Village</i>	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Aji Kuning	1	-
Bukit Harapan	-	-
Maspul	5	-
Sungai Limau	-	-
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

## 2.5. Komoditas Unggulan

### 2.5.1 Perkebunan

Tanaman perkebunan yang paling luas di Kecamatan Sebatik Tengah adalah perkebunan Kelapa Sawit (3.490 ha) dan Kakao (956 ha). Perkebunan lainnya dengan luasan yang tidak terlalu besar adalah perkebunan Kelapa (20,50 ha), Karet (4 ha), Kopi (9,50 Ha), Lada (11 ha) dan cengkeh seluas 5 ha. Data selengkapnya pada Tabel 36

**Tabel II-36**  
**Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Sebatik Tengah (ha), 2017 - 2019**

Tanaman Perkebunan <i>Estate Crops</i>	Tahun Years		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelapa Sawit/ <i>Oil Palm</i>	3 073,50	3 490	3 490
Kelapa/ <i>Coconut</i>	24,90	24,90	20,50
Karet/ <i>Rubber</i>	4	4	4
Kopi/ <i>Coffe</i>	9,50	9,50	9,50
Kakao/ <i>Cocoa</i>	1 019	956	956
Lada/ <i>Pepper</i>	6	6	11
Tebu/ <i>Sugar Cane</i>	-	-	-
Cengkeh/ <i>Clove</i>	-	5	5

Kelapa Sawit bahkan menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan karena kenaikan produksi yang signifikan sepanjang tahun 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 37

**Tabel II-37**  
**Produksi Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Sebatik Tengah (Kg), 2017-2019**

Tanaman Perkebunan <i>Estate Crops</i>	Tahun Years		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelapa Sawit/ <i>Oil Palm</i>	12 161 600	19 506 100	25 726 286
Kelapa/ <i>Coconut</i>	-	19 940	42 381
Karet/ <i>Rubber</i>	-	-	-
Kopi/ <i>Coffe</i>	6 000	1 150	1 600
Kakao/ <i>Cocoa</i>	848 601	651 017	604 304,50
Lada/ <i>Pepper</i>	-	-	-
Tebu/ <i>Sugar Cane</i>	-	-	-
Cengkeh/ <i>Clove</i>	-	-	-

Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan/Office of Agriculture Affairs of Nunukan Regency

### 2.5.2. Perikanan

Untuk perikanan, yang dominan adalah perikanan tangkap, dengan produksi mencapai 35.124 kg pada tahun 2019 seperti yang disajikan pada Tabel 38.

**Tabel II-38**  
**Produksi Perikanan Tangkap menurut Subsektor di Kecamatan**  
**Sebatik Tengah, 2018–2019**

Subsektor Subsector	Tahun/Years	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Perikanan Laut/ <i>Marine Fisheries</i>	7 205	35 124
Perairan Umum/ <i>Inland Water</i>	-	-

Kondisi perekonomian masyarakat kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara dilihat dari luas pemanfaatan lahan bergantung pada sektor perkebunan seluas 3.391 Ha dan terdapat potensi pertanian seluas 16 Ha yang masih belum dikembangkan. Komoditas hasil perkebunan yaitu kelapa sawit, kakao dan buah-buahan musiman, hanya sebagian kecil di Desa Bukit Harapan yang bergerak pada sektor pertanian. Hasil dari sektor perkebunan masih termasuk belum maksimal mendorong perekonomian masyarakat karena terdapat permasalahan dalam proses penjualan hasil panen perkebunan, yaitu belum tersedia infrastruktur untuk jalur distribusi yang memadai dan wadah untuk menampung dan menyalurkan hasil panen. Berikut data produksi perkebunan di kawasan perdesaan.

**Tabel II-39**

**Data Produksi Perkebunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan**  
**Negara Tahun 2020**

No.	Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani	Luas (Ha)		Nilai Rata-rata Produksi Kakao (Kg/Ha/Bulan)	Nilai Rata-rata Produksi Sawit (Kg/Ha/Bulan)	Jumlah Produksi Kakao (Ha/Thn)	Jumlah Produksi Sawit (Ha/Thn)
			Kakao	Sawit				
1.	Aji Kuning	5	75,5	189	3,775	17,00	45,300	204
2.	Sungai Limau	15	394	210	13,133	14,98	157,600	179,76
3.	Maspul	7	380	64	16,833	14,45	226.000	173,4
4.	Bukit Harapan	10	95	262	3,565	41,73	42,750	500,763
<b>Jumlah</b>		37	872	825	39,306	88,16	<b>511,65</b>	1057,92

*Sumber : Data Perkebunan Kecamatan Sebatik Tengah 2020*



**Gambar II-14**  
**Perkebunan Kakao (Kiri) dan Perkebunan Pisang (Kanan)**  
**Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

*Sumber: Survei Lapangan, 2015*

Kesulitan dalam distribusi membuat masyarakat memilih untuk menjual hasil panen mereka dengan harga murah di tengkulak yang langsung mengambil di lokasi. Selain sebagai petani masyarakat lainnya memiliki jenis pekerjaan dalam pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan honorarium, dan bidang swasta termasuk perdagangan berupa usaha kecil yang didukung dengan keberadaan 5 buah pasar desa dan 6 buah koperasi desa.

## 2.6. Modal Sosial Budaya

### 2.6.1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan penduduk dibawah standard hidup layak, namun ada juga dimensi lain yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga perlu fokus pada pengurangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 9,51% dan menurun hingga 6,36% pada tahun 2020. Data selengkapnya tentang Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nunukan, 2013–2020 dapat dilihat pada Tabel 40.

**Tabel II-40**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nunukan, 2013–2020**

Tahun <i>Year</i>	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	304 856	14,94	9,51
2014	312 412	14,98	8,69
2015	327 515	9,84	5,61
2016	351 479	9,63	5,25
2017	377 736	11,91	6,22
2018	403 045	13,38	6,71
2019	430 630	12,69	6,11
2020	450 718	13,76	6,36

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

### 2.6.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan, Kab. Nunukan menunjukkan penurunan meskipun fluktuatif karena beberapa hal terutama karena letak kawasan di daerah perbatasan yang

menyulitkan akses produksi dan pemasaran hasil pertanian. Pada tahun 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan hanya 0,87.

Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang nilainya pada tahun 2020 sudah sangat rendah hanya 0,17 yang artinya ketimpangan antara pengeluaran diantara penduduk miskin sudah sangat rendah.

**Tabel II-41**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Nunukan, 2013–2020**

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2013	1,29	0,29
2014	0,80	0,13
2015	0,53	0,10
2016	0,67	0,16
2017	0,80	0,18
2018	0,99	0,24
2019	1,32	0,42
2020	0,87	0,17

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

### 2.6.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dilihat dari IPMnya, Kabupaten Nunukan memiliki IPM yang terendah di Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 70,63 dibandingkan Kab. Nunukan yang hanya 65,79. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 42.

**Tabel II-42**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2016–2020**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Malinau	70,71	71,23	71,74	72,06	71,94
Bulungan	69,88	70,74	71,23	71,66	71,10
Tana Tidung	65,64	66,26	67,05	67,79	66,97
Nunukan	64,35	65,10	65,67	66,32	65,79
Tarakan	74,88	75,27	75,69	76,09	75,83
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>69,20</b>	<b>69,84</b>	<b>70,56</b>	<b>71,15</b>	<b>70,63</b>

### 2.6.4. Sosial Budaya Masyarakat

Kondisi kawasan perbatasan dengan berbagai dinamikanya berupa rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, ketertinggalan pembangunan, ketergantungan ekonomi dengan negara tetangga hingga potensi

masuknya barang-barang terlarang dan infiltrasi asing dari luar melalui kawasan perbatasan. Dinamika yang berkembang tersebut bila diabaikan dapat menimbulkan interaksi sosial yang bersifat disosiatif (negatif) didalam masyarakat yang akan memicu munculnya disintegrasi berupa konflik, baik secara internal antara masyarakat lokal ataupun secara eksternal dengan masyarakat negara tetangga. Permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua wilayah perbatasan Indonesia adalah kurang optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kawasan perbatasan serta kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di wilayah perbatasan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses wilayah perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan-hubungan yang dinamis yang terjadi diantara kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Hubungan-hubungan dinamis tersebut terjadi di antara kelompok masyarakat sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa dengan Aparat Pemerintah Desa Sungai Limau.
- b. Masyarakat Pendatang Pemula (Etnis Bugis) dengan Masyarakat Pendatang Baru (Etnis Timor) yang ada di Desa Sungai Limau.
- c. Masyarakat Desa Sungai Limau (Sebatik Indonesia) dengan Masyarakat Kampung Sungai Pukul Malaysia (Sebatik Malaysia).

Upaya asimilasi berlangsung antara masyarakat pendatang pemula (etnis Bugis) dengan pendatang baru (etnis Timor) dan antara Masyarakat Desa Sungai Limau (Sebatik Indonesia) dengan masyarakat Kampung Sungai Pukul (Sebatik Malaysia) dan tidak terjadi dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa, karena pada dasarnya pemerintah bukanlah bagian dari elemen kebudayaan. Upaya yang mengarah pada proses asimiliasi terjadi diantara etnis Bugis dengan etnis Timor, serta antara masyarakat desa Sungai Limau yang berkewarganegaraan Indonesia dengan masyarakat Kampung Sungai Pukul yang berkewarganegaraan Malaysia. Hubungan asosiatif yang terjadi antara etnis Bugis dengan etnis Timor di Sebatik memperlihatkan adanya upaya proses asimiliasi, dimana terdapat upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Upaya asimilasi ini semakin kuat ketika organisasi kepemudaan Katholik dan Ikatan Remaja Masjid melebur di bawah satu organisasi bersama dalam menjalankan perayaan-perayaan keagamaan. Selain itu, adanya perkawinan campur (amalgamation) sebagaimana yang dikatakan oleh Soekanto 36 yang terjadi antara etnis Timor dan etnis Bugis di desa Sungai Limau semakin menguatkan proses menuju asimilasi.

Berbeda halnya dengan hubungan antara kelompok etnis Bugis dengan etnis Timor yang memiliki perbedaan dalam hal agama dan etnis, hubungan antara masyarakat Desa Sungai Limau (Sebatik Indonesia) dengan masyarakat Sungai Pukul (Sebatik Malaysia) memiliki perbedaan dalam status kewarganegaraan. Dua wilayah yang hanya dibatasi oleh patok/pilar dengan pengamanan yang tidak terlalu ketat menjadi salah satu penyebab mudahnya interaksi secara tradisional antara masyarakat dua negara tersebut. Sebagaimana hubungan antara etnis Timor dan etnis Bugis yang pelan-pelan menghilangkan perbedaan-perbedaan diantara mereka, hubungan antara dua masyarakat berbeda negara ini memperlihatkan yang sama.

Hal ini ditunjukkan dengan baik dalam hubungan antara masyarakat etnis Bugis dengan etnis Timor lewat kegiatan bersama yang kerap mereka lakukan bersama saat menyelenggarakan kegiatan adat. Tak hanya dalam penyelenggaraan kegiatan adat, dalam kegiatan keagamaan etnis Bugis yang beragama Islam dan etnis Timor yang beragama Katholik saling membantu dalam melaksanakan perayaan keagamaan, bahkan dibentuk sebuah wadah yang menggabungkan organisasi pemuda Katholik dan remaja Islam yang dinamakan OM JOKO (Orang Muda BerJoko) untuk mengakomodir kegiatankegiatan agama secara bersama-sama. Lebih jauh diantara dua etnis ini telah terjadi perkawinan campur (Amalgamation). Adanya perbedaan kebudayaan antara etnis Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan dengan etnis Timor yang berasal dari NTT, juga terjadiantara masyarakat desa Sungai Limau yang di dalamnya terdapat suku Bugis dan Timor dengan masyarakat Sungai Pukul yang warganya bersuku Bajo. Proses asimilasi ini timbul bila ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, sehingga hal tersebut bisa menjadi jalan yang mengarah kepada proses asimilasi. Interaksi sosial yang terjadi di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara merupakan interaksi sosial yang bersifat asosiatif (Positif) yang mengarah kepada integrasi di dalam masyarakat di tengah perbedaan etnis, agama dan kewarganegaraan. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk kerja sama, akomodasi hingga potensi asimilasi antara masyarakat perbatasan yaitu antara pemerintah desa Sungai Limau dengan masyarakat desa Sungai Limau, antara masyarakat pendatang pemula (etnis Bugis) dengan masyarakat pendatang baru (etnis Timor) yang ada di Desa Sungai Limau dan antara masyarakat desa Sungai Limau (Indonesia) dengan Masyarakat Kampung Sungai Pukul (Malaysia). Hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa masyarakat perbatasan di desa Sungai Limau mampu menciptakan suasana yang kondusif, damai dan harmonis di tengah tantangan kehidupan dan dinamika yang kerap di alami oleh warga perbatasan baik antara pemerintah dengan masyarakat, antara sesama masyarakat Indonesia dan antara masyarakat perbatasan berbeda negara. Semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kebhinnekaan menjadi modal yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sungai Limau untuk mewujudkan kondisi aman dan damai di Desa perbatasan tersebut.

## **2.7. Kelembagaan**

Kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan kelestarian lingkungan yang beraktivitas di kawasan TNK terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: Balai TNK, LSM BIKAL (Bina Kelola Alam), LSM BEBSIC (Borneo Ecological Biodiversity Science), Mitra TNK dalam wadah Mitra Kutai (Friends of Kutai) yang merupakan gabungan 8 perusahaan nasional berskala besar yang mempunyai lokasi kegiatan bersebelahan dengan TNK diantaranya PT. KPC dan PT. Indominco Mandiri (tambang batubara), PT Pupuk Kaltim (pupuk), PT Badak NGL dan Pertamina (minyak dan gas) serta PT. Kiani Lestari, PT. Surya Hutani Jaya dan PT Porodisa (pemegang konsesi hutan). Mitra Kutai memberikan dukungan finansial dan teknis yang sangat dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan kepada Balai TNK. Bentuk partisipasi dan kerjasama Mitra Kutai tersebut dikukuhkan melalui SK Dirjen PHPA No. 121/Kpts/Dj-VI/1995 tanggal 30 April 1994.

## 2.8. Lingkungan

Di Kecamatan Sebatik Tengah, sepanjang tahun 2017-2019 tidak tercatat ada kejadian bencana sebagaimana data dari Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Angka 2020.

Tabel II-43

Banyaknya Kejadian Bencana Alam menurut Kelurahan/Desa dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Sebatik Tengah, 2019

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	Gempa Bumi Earth-quake	Tsunami	Gunung Meletus Volcanic Eruption	Tanah Longsor Landslide
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aji Kuning	-	-	-	-
Bukit Harapan	-	-	-	-
Maspul	-	-	-	-
Sungai Limau	-	-	-	-
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	-	-	-	-

Kelurahan/Desa Kelurahan/Village	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash Flood	Kekeringan Drought
(1)	(6)	(7)	(8)
Aji Kuning	-	-	-
Bukit Harapan	-	-	-
Maspul	-	-	-
Sungai Limau	-	-	-
<b>Kec. Sebatik Tengah</b>	-	-	-

## 2.9. Pendidikan

Tingkat partisipasi masyarakat kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara dalam bidang pendidikan cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jenis sarana pendidikan untuk semua jenjang sudah tersedia di kawasan ini mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2020 sarana pendidikan di kawasan perdesaan ini terdiri dari 5 PAUD swasta, 2 TK swasta, 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) dan hanya terdapat 1 SMA yang terletak di Desa Aji Kuning. Berikut data jumlah sekolah menurut desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kabupaten Nunukan tahun 2018-2020.



Gambar II-15

Sekolah Tapal Batas Sebatik Tengah (Kiri) dan SMP Negeri 1 Sebatik Tengah (Kanan)

Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Sumber: Survei Lapangan, 2015 dan Dokumentasi Desa Aji Kuning

**Tabel II-44**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

**Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2020**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	PAUD Swasta	5	5	5
2	TK Swasta	2	2	2
3	SDN	6	6	6
4	SD Swasta	-	-	-
5	SLTPN	2	2	2
6	SMA	1	1	1
7	SMKN	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

*Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020*

### 2.10. Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kabupaten Nunukan terdiri dari 1 puskesmas induk dan 3 puskesmas pembantu, di kawasan perdesaan ini tidak terdapat rumah sakit untuk melayani masyarakat yang tidak dapat ditangani puskesmas pembantu dan puskesmas induk. Rumah sakit umum daerah terletak di pulau nunukan yang jaraknya sekitar 140 km dari kawasan perdesaan. Permasalahan jarak yang jauh dan akses yang susah menjadikan masyarakat lebih memilih pergi ke rumah sakit di Tawau Malaysia, karena jarak menuju Tawau lebih dekat dibanding Nunukan didukung akses yang mudah serta fasilitas dan layanan yang jauh lebih baik dan lengkap. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan masih terbatas terdiri dari 4 dokter, 11 perawat, 10 bidan. Berikut data sarana dan prasarana kesehatan menurut desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara tahun 2020.



**Gambar II-16**

**Puskesmas Pembantu Limau, Desa Sungai Limau (Kiri) dan Posyandu Noranisa, Desa Aji Kuning (Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

*Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Limau dan Aji Kuning*

**Tabel II-45**  
**Jumlah Sarana Kesehatan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Puskesmas Induk	1
3	Puskesmas Pembantu	3
4	Poskesdes	1
5	Puskesmas Keliling	1
6	Posmaldes	0
7	Klinik/ Praktek Dokter	0
8	Posyandu	9
9	Bidan Praktek	10
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

*Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020*

### 2.11. Air Bersih

Sumber air bersih di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah mengandalkan air hujan yang ditampung dalam tandon air dan sumur atau bak air yang dibuat secara swadaya serta bantuan pembangunan bak penampungan air. Masyarakat kawasan perdesaan menggunakan air hujan sebagai sumber mata air bersih yang digunakan sehari-hari karena air bersih yang bersumber dari PDAM belum berfungsi maksimal, dan air sungai sebagai sumber alternatif lain yang digunakan untuk kebutuhan non konsumsi.

Pada musim hujan air yang bersumber dari sungai tidak dapat dimanfaatkan karena air sungai akan menjadi keruh oleh lumpur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak dapat digunakan untuk keperluan kebersihan. Sedangkan pada musim kemarau sebagian masyarakat di perbatasan mendapatkan air bersih dari Malaysia karena kawasan perdesaan mengalami masalah kesulitan air bersih, pada musim kemarau tidak terdapat air hujan dan debit air sungai menurun.



**Gambar II-17**  
**Kondisi Sumur Bor Desa Sungai Limau (Kiri) dan *Profil Tank* Program PNPM**  
**Desa Bukit Harapan**  
**(Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**  
*Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Limau dan Bukit Harapan*

## BAB III ANALALIS ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Potensi dan Masalah

Analisis potensi masalah dan dokumen perencanaan masing-masing desa merupakan dasar dalam merumuskan analisis isu-isu strategis yang terdapat dalam kawasan perdesaan. Berikut ini merupakan analisis potensi dan masalah masing-masing desa, potensi dan masalah kawasan perdesaan dan analisis atau telaah dari dokumen perencanaan terkait kawasan perdesaan.

#### 3.1.1 Potensi dan Masalah Masing-masing Desa

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Kesepakatan Kawasan Perdesaan di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada tanggal 29 September 2015 bersama dengan Sekretaris Camat, Kepala Desa terkait, tokoh masyarakat serta perwakilan dari SKPD Kabupaten Nunukan, telah di sampaikan beberapa masalah, potensi, serta usulan program dari masing-masing desa yang masuk dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara. Selain dari hasil musyawarah untuk mengetahui potensi, masalah serta usulan program di Kawasan Perdesaan ini juga dilakukan kajian terhadap Dokumen RPJMDes yang ada di masing-masing desa dan survei lapangan di beberapa desa yang masuk dalam kawasan perdesaan ini. Namun, survei lapangan tidak menghasilkan banyak data maupun informasi karena keterbatasan waktu yang dimiliki surveyor selama di lapangan. Berikut hasil rangkuman potensi, masalah, serta usulan program dari masing-masing desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara.

**Tabel III-1**

**Potensi dan Masalah Setiap Desa di Kawasan Perdesaan Perkebunan Perbatasan Negara Tahun 2015**

Kecamatan	Desa	Uraian	Usulan Program
Kecamatan Sebatik Tengah	Desa Aji Kuning	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perkebunan kelapa sawit</li> <li><input type="checkbox"/> Perkebunan coklat</li> <li><input type="checkbox"/> Perkebunan pisang</li> <li><input type="checkbox"/> Perkebunan buahlainnya (Pisang, Durian)</li> <li><input type="checkbox"/> Wisata patok III batas negara</li> </ul>	Pemenuhan kebutuhan air bersih (sumber air), dan energi listrik Fasilitasi pemasaran produk UKM
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sulitnya pemasaran hasil pertanian</li> <li><input type="checkbox"/> Akses Jalan yang sulit</li> <li>• Kesulitan dalam penataan perumahan yang ada di kawasan perbatasan Negara</li> <li>• Masalah air bersih</li> <li>• Tidak tersedia tempat bongkar muat</li> </ul>	
	Desa Sungai Limau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan coklat</li> <li>• Perkebunan kelapa sawit</li> <li>• Perkebunan pisang</li> <li>• Hasil kayu perkebunan</li> <li>• Buah-buahan</li> </ul>	Pelatihan pengolahan hasil kebun untuk mendapat nilai tambah
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil pertanian dijual langsung tanpa ada nilai tambah</li> <li>• Masalah air bersih</li> <li>• Masalah pendidikan di tapal batas</li> <li>• Masalah sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>• Kurangnya pengetahuan mengenai industri pengolahan hasil perkebunan dan pupuk subsidi</li> </ul>	

Kecamatan	Desa	Uraian	Usulan Program
	Desa Bukit Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan coklat</li> <li>• Perkebunan kelapa sawit</li> <li>• Perkebunan pisang</li> <li>• Buah-buahan</li> <li>• Masalah perkebunan, komoditas beralih dari coklat ke sawit.</li> <li>• Jalan belum beraspal jadi sulit untuk mengeluarkan hasil pertanian.</li> <li>• Luas lahan sawah yang digarap berkurang karena tidak tersedianya alat pendukung pertanian</li> <li>• Permasalahan bibit unggul (bibit diambil dari hasil panen)</li> <li>• Masalah pendidikan, jam pelajaran sering kosong, guru kesulitan menjangkau lokasi sekolah karena jarak yang jauh dan akses yang sulit</li> <li>• Masalah kesehatan, tenaga medis berasal dari luar, tidak ada kendaraan dinas untuk menjangkau rumah-rumah warga yang jaraknya cukup jauh dan warga juga kesulitan mencapai Pustu.</li> <li>• Listrik belum ada, masih memanfaatkan PLTS dari Kementerian ESDM</li> <li>• Masalah air bersih, tidak ada mata air. Hanya menampung air hujan.</li> <li>• Belum ada sinyal, sehingga menghambat komunikasi.</li> </ul>	Pembangunan ekonomi melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan SDM
Kecamatan Sebatik Tengah	Desa Maspul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan coklat</li> <li>• Perkebunan kelapa sawit</li> <li>• Perkebunan pisang</li> <li>• Perkebunan durian</li> <li>• Kesulitan air bersih, hanya mengandalkan sumur resapan dari air hujan</li> <li>• Masalah perkebunan, komoditas beralih dari coklat ke sawit.</li> <li>• Kurangnya jumlah pupuk subsidi</li> <li>• Komoditas unggulan durian, tapi selama ini hanya dijual mentah ke Malaysia</li> <li>• Hasil panen pisang berlimpah, namun selama ini langsung masuk kontainer di bawa ke Malaysia, Singapura, dan Brunei</li> <li>• Jalan belum beraspal</li> </ul>	Pembangunan infrastruktur Penyaluran distribusi hasil panen

*Sumber: Jaring aspirasi masyarakat Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah, September 2015*

### 3.1.2 Potensi dan Masalah Kawasan Perdesaan

Berdasarkan hasil rangkuman potensi, masalah serta usulan program dari masing-masing desa yang masuk dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara, terdapat beberapa potensi, masalah, serta usulan program yang sama antara satu desa dengan desa lainnya. Oleh karena itu, beberapa kondisi yang sama itu akan diangkat menjadi potensi, masalah,

serta usulan program kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara. Berikut hasil analisa yang akan menjadi potensi, masalah, dan usulan program Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara.

**Tabel III-2**  
**Potensi dan Masalah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2015**

POTENSI	MASALAH	USULAN PROGRAM
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potensi lahan perkebunan kelapa sawit</li> <li>▪ Potensi lahan perkebunan kakao</li> <li>▪ Potensi lahan perkebunan pisang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masalah ketersediaan sumber air bersih</li> <li>▪ Masalah kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai</li> <li>▪ Sulitnya jaringan listrik dan komunikasi</li> <li>▪ Sulitnya akses mencapai pusat dansaranapendidikan</li> <li>▪ Akses jalan ke lahan perkebunan belum memadai, sehingga sulit dalam distribusi hasil panen</li> <li>▪ Kurangnya pengetahuan mengenai cara mengolah hasil panen untuk mendapatkan nilai tambah.</li> <li>▪ Kesulitan dalam pemasaran hasil perkebunan, selalu dijual ke tengkulak Malaysia.</li> <li>▪ Harga beli hasil panen yang dipermainkan oleh tengkulak.</li> <li>▪ Kurangnya sarana produksi bagi sektor perkebunan</li> <li>▪ Kesulitan dalam penataan wilayah di perbatasan, terdapat 30 rumah di garis perbatasan negara</li> <li>▪ Kondisi sungai/saluran pembuangan air belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki dan pembangunan sarana dan prasarana</li> <li>▪ Pembangunan jalur angkut hasil perkebunan.</li> <li>▪ Pelatihan dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil panen perkebunan serta cara pemasarannya</li> <li>▪ Pengadaan sarana produksi</li> <li>▪ Penambahan teknologi dan alat-alat untuk mendukung sektor perkebunan</li> <li>▪ Normalisasi Sungai</li> </ul>

*Sumber: Jaring aspirasi masyarakat Kawasan Perdesaan Perkebunan Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah, September 2015*

### **3.2 Hasil Telaah Dokumen Perencanaan Kabupaten Nunukan**

Dalam merencanakan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kabupaten Nunukan, diperlukan telaah/peninjauan atas dokumen perencanaan lain yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ini. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ini pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan di Kabupaten Nunukan dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Perkebunan di Perbatasan Negara. Berikut hasil telaah dari RPJPD, RPJMD, RTRW Kabupaten Nunukan dan RPJM Desa.

**Tabel III-3  
Penelaahan Dokumen Perencanaan**

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	RTRW Kabupaten/Kotora	2012-2032	<p>Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Aji kuning Kecamatan Sebatik Tengah:</p> <p>a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan: Pekerjaan peningkatan jalan Desa Bukit Harapan menuju Desa Lapri, dan menuju Desa Sungai Nyamuk Pekerjaan peningkatan jalan Aji Kuning Pekerjaan peningkatan jalan Maspul-Lodres</p> <p>b. Rencana sistem jaringan sumberdaya air: Jaringan air bersih ke kelompok pengguna: jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Sebatik Tengah</p> <p>c. Sistem jaringan air minum: Pengembangan dan peningkatan pelayanan sumber air minum perkotaan: Sungai pancang sebagai sumber air</p>	<p>Rencana Struktur Ruang</p>
			<p>Rencana pola ruang untuk kecamatan Sebatik Tengah dengan luas keseluruhan 4.771 Ha, meliputi alokasi pemanfaatan ruang:</p> <p>1. Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 419Ha;</p> <p>2. Areal Penggunaan Lain, seluas kurang lebih 4.352 Ha, dengan rincian;</p> <p>a. Kawasan Perkebunan, seluas kurang lebih 3.494 Ha;</p> <p>b. Permukiman, seluas kurang lebih 286 Ha;</p> <p>c. Pertanian, seluas kurang lebih 14 Ha;</p> <p>d. Kawasan Budidaya Lainnya, seluas kurang lebih 558Ha;</p>	<p>Rencana pola ruang</p>

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
			<p>Bentuk kesatuan ruang ekonomi salah satunya yaitu kawasan Perdagangan Perbatasan Sebatik:            Pada sub kesatuan ruang ekonomi ini akan dikembangkan keterkaitan desa-desa di sekitar Kecamatan Sebatik yang berbatasan dengan Kota Tawau, Malaysia dengan basis pengembangan usaha perikanan laut, industri pengolahan perikanan, perdagangan dan usaha pertanian terbatas.</p>	
			<p>Pulau Sebatik sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa kawasan perbatasan laut Republik Indonesia</p>	<p>Rencana Kawasan Strategis</p>
2	RPJM Daerah	2011-2016	<p>Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik untuk kelancaran mobilitas masyarakat            Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka mendorong kelancaran mobilitas barang, jasa dan orang</p>	<p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p>
			<p>Meningkatkan ketersediaan air untuk mewujudkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.</p>	<p>Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana public (pemenuhan kebutuhan air)</p>
			<p>Mendorong terwujudnya ketersediaan sumber energi listrik bagi kebutuhan masyarakat:            Kondisi kecamatan sebatik (2010) berdasarkan ketersediaan daya listrik per Kecamatan hanya 2%</p>	<p>Program Perluas Jaringan Listrik</p>
			<p>Mengembangkan usaha perkebunan yang berbasis komoditas unggulan dan nilai tambah</p>	<p>Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis agrobisnis</p>

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
			Meningkatkan pengetahuan petani dengan pemberdayaan penyuluhan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			Memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam perdagangan antar Negara Meningkatkan kerjasama , perdagangan antar wilayah perbatasan dan antar negara	Meningkatnya wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan
3	RPJP Daerah	2005-2025	Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktifitas dengan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan	Program peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau antar daerah, antar negara tetangga dan antar ibu kota Kabupaten ke seluruh kecamatan dan daerah terpencil
			Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial ( <i>social goods</i> ) dan sumber daya ekonomi ( <i>economic goods</i> ) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri
3	RPJM Desa Bukit Harapan	2015	Pengaspalan jalan Desa Pembukaan badan jalan Pengadaan jaringan listrik Bantuan kabel listrik PLTS Pengadaan air bersih Pembangunan Tower Telekomunikasi Pembangunan drainase Pembuatan jalan usaha tani Bantuan alat-alat pertanian Pelatihan bagi kelompok-kelompok tani Pengadaan bibit unggul Percetakan lahan sawah	Program Pembangunan Desa

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
4	RPJM Desa Maspul	2015	Peningkatan/Pengaspalan jalan Pembukaan badan jalan Pemasangan jaringan PLN Bantuan Listrik Komunal Pembangunan Sekolah Dasar Pembangunan Tower Telekomunikasi Pembangunan Puskesmas Peningkatan Jalan Usaha Tani (5 Titik) Pelatihan Membuat Meubel dari Pelapah Pisang Bantuan Subsidi Pupuk Bantuan Mesin Sprayer Bantuan Insektisida Bantuan Traktor Mini Pengangkut Hasil Bantuan Dana Penanaman Pisang Bantuan Bibit Serba Sayuran Pelatihan Tentang teknologi tepat guna Petani Pelatihan Menggunakan teknologi tepat guna (Mesin Keripik) Peningkatan jalan usaha tani	
5	RPJM Desa Sungai Limau	2015	Pembangunan dan peningkatan jalan Pembukaan jalan antar desa dan Kecamatan Pembangunan jembatan beton Pembangunan Tower Telekomunikasi Pembangunan sarana air bersih Pengadaan armada angkutan pelajar	

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
6	RPJM Desa Aji Kuning	2015	Peningkatan jalan dan jembatan Pembukaan badan jalan Peningkatan Jalan Usaha Tani Pembangunan Tambatan Perahu Normalisasi dan Siring Sungai Bantuan Pupuk & Obat-Obatan Bantuan pupuk subsidi Pembuatan jembatan usaha tani Pembukaan jalan usaha tani Bantuan mesin keripik pisang dan keladi	

Sumber:

- 1) RPJPD Kabupaten Nunukan 2005-2025
- 2) RPJMD Kabupaten Nunukan 2011-2016
- 3) RTRW Kabupaten Nunukan 2012-2032
- 4) RPJM Desa 2015

### 3.3 Isu Strategis

Berdasarkan analisis potensi dan masalah yang ada di setiap desa dihasilkan potensi masalah kawasan perdesaan sebagai dasar perumusan isu strategis. Isu Strategis di kawasan perdesaan ini meliputi:

#### 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana

Permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir semua kawasan perbatasan di Indonesia adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kawasan perdesaan ini menghadapi masalah kurangnya penyediaan air bersih, kondisi jalan dan jembatan penghubung yang masih belum memadai, jaringan telekomunikasi yang jangkauannya masih belum bias melayani semua kawasan, ketersediaan energy listrik dan jaringannya yang terbatas. Permasalahan yang mendasari tidak hanya masalah ketersediaan tetapi juga masalah kualitas yang belum mampu mendukung kegiatan masyarakat secara optimal.



**Gambar III-1**  
**Jalan Agregat di Perbatasan Desa Sungai Limau (kiri) dan Jalan Tanah di**  
**Desa Sungai Limau (kanan)**

*Sumber: Survei Lapangan, 2015*

Masalah kurangnya ketersediaan air bersih merupakan masalah utama yang dihadapi oleh kawasan perdesaan karena kondisi hidrogeologi kawasan termasuk dalam sumber air tanah langka, sehingga tidak bias mengandalkan air tanah sebagai sumber air. Masyarakat kawasan perdesaan 100% hanya mengandalkan tampungan air hujan untuk kebutuhan konsumsi, sementara untuk non konsumsi air sungai menjadi satu-satunya pilihan masyarakat. Permasalahan menjadi bertambah jika musim kemarau karena tidak ada air hujan sebagai sumber air, solusi yang diterapkan masyarakat selama ini adalah membeli air dari kecamatan lain bagi masyarakat yang memiliki dana tambahan, tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu tetapakan mengandalkan air sungai. Masalah lain terkait sarana prasarana yaitu kondisi prasarana perhubungan yang belum memadai baik itu jalan maupun jembatan, perhubungan merupakan hal paling penting dalam pembangunan kawasan karena menyangkut pergerakan dan aksesibilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat dan aktivitas pembangunan. Dari permasalahan yang dihadapi ini terbentuklah satu isu strategis yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.

## **2. Rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan**

Potensi sektor perkebunan sebagai tumpuan ekonomi masyarakat kawasan perdesaan ini tidak terlepas dari permasalahan harga jual yang rendah dan sulitnya pemasaran hasil panen. Kesulitan dalam pemasaran hasil panen karena hanya terdapat pasar di Malaysia dengan tengkulak sebagai perantara jual beli, terbatasnya pasar membuat masyarakat tidak memiliki posisi tawar yang kuat dengan para tengkulak. Kedudukan tengkulak dalam menentukan harga komoditas sangat kuat sehingga masyarakat sering merasa dirugikan karena harga beli yang ditetapkan terlalu rendah. Selain faktor keberadaan pasar, petani kelapa sawit, kakao dan pisang juga memilih menjual ketengkulak karena cepat dalam prosesnya dan untuk menghindari kerusakan komoditas, semua komoditas dijual dalam bentuk mentah ketengkulak, petani tidak memiliki nilai tambah karena tidak dilakukan industri pengolahan. Walaupun saat ini sudah terdapat beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan perdesaan yang dilatih untuk mengolah hasil perkebunan seperti komoditas pisang, tetapi mereka tetap menemui kesulitan dalam pemasaran dan inovasi pengembangan produk. Pemasaran ke dalam negeri juga memiliki hambatan yaitu masalah kondisi sarana dan prasarana pemasaran, seperti kondisi jalur perhubungan yang tidak memadai, belum tersedianya jalan usaha tani yang mendukung proses distribusi, dan belum tersedianya sarana pemasaran khusus untuk sektor perkebunan.

## **3. Adanya hubungan interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik - Indonesia**

Wilayah Sebatik Indonesia dan Tawau Malaysia dalam beberapa aspek memiliki suatu hubungan *interdependence*. Hubungan saling ketergantungan ini didominasi oleh faktor kebutuhan ekonomi, produksi, dan tenaga kerja. Hubungan ini menimbulkan keuntungan dan manfaat nasional yang lebih dioptimalkan oleh pihak Malaysia dibandingkan Indonesia karena secara ekonomi dan infrastruktur, Tawau jauh lebih baik dan lebih maju angka perdagangan ekspor impor kedua kawasan juga memperlihatkan kesenjangan (defisit dari sisi Indonesia) yang sangat besar. Tantangan terberat dari penyediaan pelayanan publik di kawasan perdesaan pulau Sebatik Indonesia adalah tuntutan masyarakat atas pelayanan dengan merujuk pada fasilitas dan pelayanan publik di Malaysia (Tawau) Malaysian *minded*. Dalam konteks kawasan perdesaan, kawasan (perdesaan) sebatik Malaysia adalah pasar yang cukup potensial untuk digarap. Selain itu tata laksana lintas batas antar Negara menjadi suatu permasalahan yang dihadapi karena sulitnya peraturan yang diterapkan bagi pelintas antar Negara, dan menjadi satu hal penting untuk membentuk suatu lembaga interaksi yang bias menjadi basis kegiatan antar Negara untuk aspek hubungan lainnya.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan

Tujuan merupakan arah atau keadaan yang ingin dicapai dimasa mendatang untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi, dan menangani isu-isu strategis yang ada di kawasan perdesaan, tujuan dirumuskan dari isu strategis yang muncul berdasarkan potensi dan masalah kawasan perdesaan. Pada kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terdapat 2 isu strategis utama yaitu kurangnya sarana prasarana, serta rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan. Dari isu strategis dihasilkan tujuan pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana

Berdasarkan analisis isu strategis kurangnya ketersediaan sarana prasarana yang berpengaruh terhadap kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sektor perkebunan, dirumuskan tujuan meningkatkan kelengkapan sarana prasarana. Dalam tujuan ini meningkatkan kelengkapan berarti memenuhi kebutuhan masyarakat kawasan perdesaan dengan membangun kekurangan sarana prasana dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah ada khususnya masalah air bersih, prasarana perhubungan menuju sarana pendidikan dan kesehatan, dan jaringan komunikasi. Kebutuhan akan ketersediaan sarana prasarana merupakan hal penting bagi masyarakat kawasan perdesaan perbatasan untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan membangun kawasan.

#### 2. Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan

Berdasar isu strategis sektor perkebunan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan arahan yang dirumuskan untuk menangani isu pemasaran adalah mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan. Tujuan ini bermaksud membantu petani dalam memasarkan hasil panen, mempermudah pemasaran berarti memberikan suatu jalan dengan pembangunan sarana prasarana yang membantu dalam pemasaran hasil panen perkebunan dimulai dari pengangkutan sampai dengan proses distribusi komoditas kepada pengumpul atau konsumen.

#### 3. Meningkatkan nilai jual perkebunan

Berdasar isu strategis sektor perkebunan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan, tujuan yang dirumuskan untuk menangani isu strategis ini adalah meningkatkan nilai jual hasil panen perkebunan. Tujuan ini bermaksud menambah nilai jual masyarakat dari sektor perkebunan karena selama ini nilai tambah yang didapatkan belum optimal karena komoditas langsung dijual tanpa ada industri pengolahan. Meningkatkan nilai jual berarti meningkatkan kualitas komoditas perkebunan yang dapat bersaing sehingga memiliki harga jual tinggi serta menciptakan nilai tambah dengan cara pengembangan industri pengolahan komoditas.

#### 4. Mempermudah tatalaksana lintas batas

Berdasarkan isu strategis mengenai masalah hubungan ketergantungan yaitu adanya interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia, tujuan yang dirumuskan untuk menangani isu ini adalah mempermudah tatalaksana lintas batas. Tujuan ini bermaksud memudahkan para pelintas baik WNI atau warga Negara Malaysia untuk melintas, kemudahan melalui lintas batas khususnya batas darat (PLBD) memberikan keuntungan dari segi ekonomi dengan meningkatkan arus kerjasama dan perdagangan.

## 5. Mengeratkan hubungan sosial budaya antar negara

Berdasar isu strategis keberadaan interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia, tujuan lain yang dirumuskan adalah mengeratkan hubungan sosial budaya antar kedua Negara. Tujuan ini bermaksud untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menjaga hubungan kekeluargaan yang sudah tercipta. Tujuan ini dapat membentuk suatu ubungan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dalam bidang lainnya.

### 4.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu target yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan. Berdasarkan tiga tujuan yang sudah dirumuskan diatas, berikut sasaran yang menjadi target capaian:

1. Untuk mencapai tujuan “meningkatkan kelengkapan sarana prasarana”, akan dicapai dengan tiga sasaran, antara lain:

**a. Terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai**

Salah satu sasaran kelengkapan sarana prasarana adalah terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai. Maksud dari target ini adalah mewujudkan pembangunan sarana prasarana air bersih yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendukung kegiatan dan pelayanan dalam kawasan perdesaan. Selain air bersih, pembangunan sarana prasarana perhubungan bermaksud untuk membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang memudahkan pergerakan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan karena masalah susahnya akses menuju lokasi, pembangunan prasarana perhubungan dapat memudahkan untuk menjangkau lokasi sarana sehingga dapat memaksimalkan pelayanan.

**b. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga**

Sasaran selanjutnya mengenai masalah sarana prasarana adalah terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga. Energi listrik merupakan kebutuhan yang penting karena banyak kegiatan dan infrastruktur yang bergantung pada keberadaan energi listrik, ketersediaan energi listrik menjadi masalah utama dari setiap desa karena hanya mendapat *supply* yang terbatas. Maksud dari target ini yaitu masyarakat dapat mengakses jaringan listrik dan kebutuhan masyarakat kawasan perdesaan untuk kebutuhan listrik dapat terpenuhi.

**c. Terwujudnya kemudahan akses komunikasi**

Jaringan komunikasi menjadi hal penting bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan ataupun usaha serta dalam mengakses informasi. Susahnya jaringan komunikasi menjadi masalah hampir disemua kawasan, hal ini karena layanan jaringan yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu ditentukan sasaran terwujudnya kemudahan akses komunikasi dengan pembangunan tower telekomunikasi yang akan memperluas jaringan akses komunikasi.

2. Untuk mencapai tujuan “Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan”, maka akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

**a. Terdistribusikannya hasil panen perkebunan**

Masalah pemasaran disebabkan karena susahnya distribusi, sehingga sasaran yang dirumuskan yaitu terdistribusikannya hasil panen perkebunan yang bermaksud tersalurkannya produksi perkebunan menuju pasar. Hasil panen perkebunan sebagian besar oleh masyarakat dijual ke tengkulak Malaysia karena petani kesulitan dalam memasarkannya, ada beberapa

faktor yang menjadi dasar mereka menjual ke tengkulak yaitu masalah keterbatasan transportasi angkut, tidak tersedianya pasar dan ketahanan komoditas setelah panen. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh adalah penyediaan sarana jalan usaha tani, pengangkutan, pembangunan tempat pengumpulan hasil perkebunan dan penyaluran produksi.

3. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan nilai jual perkebunan” maka akan dicapai dengan dua sasaran sebagai berikut:
  - a. **Terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan**

Sektor perkebunan di kawasan perdesaan menghadapi permasalahan rendahnya harga jual perkebunan karena sering dipermainkan oleh tengkulak dan komoditas langsung dijual mentah tanpa ada pengolahan, maka sasaran yang dirumuskan adalah terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan. Nilai jual dapat ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan pengolahan kepada petani, pengolahan hasil perkebunan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah bagi produksi perkebunan sehingga harga jual dapat ditingkatkan tidak hanya berupa komoditas mentah.
  - b. **Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas**

Sasaran kedua dari tujuan diatas adalah terwujudnya peningkatan kualitas komoditas perkebunan, selain berfokus pada nilai jual hasil perkebunan, target lain yang dapat dicapai yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas dengan cara pengembangan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
4. Untuk mencapai tujuan “Mempermudah tata laksana” maka akan dicapai dengan dua sasaran sebagai berikut:
  - a. **Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku**

Lokasi kawasan perdesaan yang terletak di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kegiatan kota dibanding dengan Tawau-Malaysia. Dari aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sektor industri pengolahan Tawau terbentuk suatu hubungan ketergantungan antar kedua pihak, tetapi tatalaksana lintas batas yang ada saat ini belum mendukung kelancaran hubungan tersebut. Hal ini menjadi dasar untuk menyederhanakan peraturan yang dapat diterapkan di lintas batas darat.
5. Untuk mencapai tujuan “Mengeratkan hubungan sosial budaya antar negara” maka akan dicapai dengan dua sasaran sebagai berikut:
  - a. **Terwujudnya hubungan yang harmonis antar negara**

Letak kawasan di daerah perbatasan menjadikan hubungan atau interaksi yang terjadi antar kedua Negara menjadi suatu hal yang penting, khususnya dalam interaksi ekonomi. Hubungan di kawasan perbatasan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi terdapat aspek sosial budaya yang menjadi dasar interaksi antar warga Negara. Maka sasaran yang dirumuskan adalah mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antar Negara, bisa dilakukan dengan membentuk suatu lembaga yang dapat mewadahi interaksi kedua belah pihak.

**Tabel IV-1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan**  
**Perkebunan di Perbatasan Negara**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana	Terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai
		Terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga
		Terwujudnya kemudahan akses komunikasi
Rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan	Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan	Terdistribusikannya hasil panen perkebunan
	Meningkatkan nilai jual perkebunan	Terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan
		Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas
Adanya hubungan interdependensi antara Tawau Malaysia dan Sebatik Indonesia	Mempermudah tata laksana lintas batas	Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku
	Mengeratkan hubungan sosial budaya antar negara	Terwujudnya hubungan yang harmonis antar negara

*Sumber: Analisis, 2015*

#### 4.3 Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Berikut adalah review terhadap program kegiatan yang diusulkan pada financial matriks, dikaitkan dengan peubah dan indikator IPKP sehingga dapat memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dalam pembangunan kawasan perdesaan, kesesuaian antara program yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan kawasan perdesaan, serta tercapai peningkatan status kemajuan kawasan perdesaan tersebut: Lampiran **Tabel IV-2**.

##### **Review Program Kegiatan pada Financial Matriks**

No	Program dan Kegiatan RPKP 2019-2023 yang sudah dipetakan sesuai dimensi dan peubah IPKP	Program dan Kegiatan RPKP 2024-2028
----	---	-------------------------------------

#### A. Dimensi Ekonomi

A	Dimensi Ekonomi	Program dan Kegiatan RPKP 2024-2028
1	Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan:	
	8.1 Pengadaan, distribusi bibit dan pembangunan perkebunan 9.1 Pengadaan pupuk bersubsidi 10.1 Pengadaan pembasmi hama dan penyakit meningkatkan nilai tambah.	Agar diupdate apakah kegiatan pada RPKP 2019-2023 sudah dilaksanakan atau belum, kalau belum dilanjutkan karena kegiatannya bagus atau mungkin perlu refocusing
2	Pelibatan Masyarakat dan UMKM dalam Pengembangan Komoditas Unggulan	
	Tidak ada program	Perlu pelibatan masyarakat (UMKM) secara luas dalam pengembangan komoditas unggulan. Perlu diupdate apakah kegiatan pada RPKP

		2019-2023 sudah dilaksanakan atau belum, kalau belum dilanjutkan karena kegiatannya bagus atau mungkin perlu refocusing
<b>3</b>	Peran BUMDES dan atau BUMDES Bersama Mengembangkan Komoditas Unggulan	
	6.1 Pembangunan tempat pembinaan produksi dan pengumpulan hasil panen dan produksi	Program harus didesain oleh dan untuk BUMDes dan BUMDES bersama sehingga pengurus dan anggota secara bersama-sama mengembangkan komoditas unggulan
<b>4</b>	Pengembangan Jejaring Klaster/ Kawasan Perdesaan	
	Tidak ada	program Klaster (manajemen klaster) agar didorong untuk mempromosikan produk barang dan jasa yang dihasilkan
<b>5</b>	Promosi Komoditas Unggulan oleh Klaster	
	Tidak ada program	Agar dibuatkan keterkaitan antar kawasan perdesaan (klaster) dengan kawasan (klaster) lainnya dan atau pusat kegiatan (PKL/PKW/PKN)
<b>6</b>	Sertifikasi/Standarisasi Produk yang Dihasilkan	
	Tidak ada program	Agar dibuat kegiatan untuk sertifikasi produk minimal untuk SNI
<b>7</b>	Tingkat Melek Keuangan Masyarakat	
	12.1 Pemberian bantuan modal dan peralatan	Agar dibuat kegiatan dengan menggandeng perbankan contohnya adalah sosialisasi agar masyarakat melek keuangan
<b>8</b>	Kepemilikan dan/atau Penguasaan Lahan	
	Tidak ada program	Agar dibuat kegiatan penyusunan sampai penetapan kebijakan tentang kepemilikan dan penggunaan lahan

## B. Dimensi Sosial Budaya

<b>B</b>	Dimensi Sosial Budaya	
<b>1</b>	Kreativitas Masyarakat	
	11.1 Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan hasil produksi Perkebunan 11.2 Penyuluhan dan Pendampingan bagi pelaku usaha 11.3 Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan perkebunan dan pengaturan kewenangan lembaga petani	Perlu dibuat kegiatan yang mendorong kreativitas masyarakat dalam produksi, pengolahan, promosi, pemasaran produk unggulan
<b>2</b>	Pelibatan Pelaku Seni dan Budaya	
	Tidak ada program	Perlu disusun kegiatan melibatkan pelaku seni dan budaya sehingga ada sinkronisasi antara pengembangan kawasan dengan pemanfaatan potensi wisata/budaya dengan

		masyarakat setempat
<b>3</b>	Pemanfaatan Produk Budaya Masyarakat	
	Tidak ada program	Perlu dibuat kegiatan untuk memanfaatkan produk budaya dalam mengembangkan produk unggulan kawasan
<b>4</b>	Migrasi Penduduk Keluar	
	Kawasan Tidak ada program	Perlu pelibatan masyarakat lokal secara optimal agar mengurangi migrasi
<b>5</b>	Governansi Budaya	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan untuk pelibatan warga dalam pengelolaan institusi budaya, program dan acara, baik secara langsung maupun melalui organisasi masyarakat madani
<b>6</b>	Budaya dan Pendidikan	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan untuk internalisasi budaya dalam pendidikan
<b>7</b>	Budaya, Informasi dan Pengetahuan	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintah kabupaten, pengurus klaster/kawasan dan dunia usaha melibatkan masyarakat dalam mempromosikan budaya mulai dari menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan secara digital
<b>8</b>	Budaya dan Perencanaan	
	Tidak ada program	Dimensi budaya agar dimasukan dalam perencanaan, sehingga perlu ada kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan budaya
<b>9</b>	Budaya, Kesetaraan dan Inklusi Sosial	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan untuk membangun fasilitas budaya khususnya untuk difabel (tuna daksa, tuna rungu, tuna netra) dan orang-orang rentan (orang tua, ibu hamil dlsb) yang ada di seluruh kawasan
<b>10</b>	Kerekatan Sosial	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan-kegiatan gotong royong dan kegiatan budaya secara reguler minimal sekali dalam setahun yang melibatkan seluruh masyarakat, adanya PERDA atau norma masyarakat untuk resolusi konflik

### C. Dimensi Lingkungan

<b>C</b>	C Dimensi Lingkungan	
<b>1</b>	Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada Tata Ruang Kawasan Perdesaan	
	12.1 Penetapan peraturan lintas batas yang sederhana 13.1 Pembentukan lembaga kerjasama antar negara	Perlu dibuat kebijakan untuk membuat RDTR Kawasan Perdesaan
<b>2</b>	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	Tidak ada program	Apabila RTH < 30 % perlu reboisasi lahan
<b>3</b>	Pemanfaatan Amenity Resources untuk Kegiatan Ekonomi dan Sosial	
	Tidak ada program	Perlu ditambahkan kegiatan tentang Pemanfaatan Amenity Resources untuk pengembangan komoditas unggulan wisata.
<b>4</b>	Regulasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan penyusunan PERDA pengelolaan lingkungan dan memasukan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal
<b>5</b>	Adaptasi terhadap perubahan iklim	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan pendampingan para pelaku usaha, berkaitan dengan pengusahaan kegiatan ekonomi utama yang beradaptasi dengan lingkungan
<b>6</b>	Kapabilitas Mitigasi Bencana	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan mitigasi bencana dan reboisasi, misalnya melalui penanaman kembali mangrove sebagai penahan abrasi .
<b>7</b>	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan pengelolaan sampah melalui penyediaan sarpras sampah dengan pengelolaan sampah dengan 3 R
<b>8</b>	Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan limbah komoditas unggulan di dalam kawasan

### D. Dimensi Sarana dan Prasarana

<b>D</b>	Dimensi Sarana dan Prasarana	
<b>1</b>	Konektivitas antar Desa dalam Kawasan	
	2.1 Pembangunan jalan dan jembatan 2.2 Peningkatan kualitas jalan 2.3 Betonisasi Jembatan 5.1 Peningkatan kualitas jalan usaha tani 7.2 Peningkatan kualitas dermaga bongkar muat	Perlu diupdate dengan kondisi yang terbaru

2	SMK	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan pembangunan SMK dan prodi yang sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan
3	Pelayanan Pendidikan Vokasi dan Ketrampilan	
	Tidak ada program	Perlu ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengembangan komoditas unggulan melalui pendidikan vokasi dan lingkungan
4	Aksesibilitas ke dan dari Kawasan serta ke Sentra Komoditas Unggulan	
	Tidak ada program	Perlu diupdate kegiatan tentang sarpras transportasi untuk peningkatan akses untuk memudahkan arus distribusi barang dan orang
5	Angkutan Umum	
	7.1 Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan	Perlu diupdate untuk kegiatan sarana transportasi umum barang dan penumpang
6	Elektrifikasi Kawasan Perdesaan	
	3.1 Pembangunan dan pengembangan jaringan pembangkit energi listrik	Perlu update data tentang kegiatan peningkatan elektrifikasi desa
7	Pemanfaatan Telepon Genggam dan Internet	
	4.1 Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi 6.2 Fasilitasi pembuatan website Kawasan	Perlu ada update kegiatan tentang peningkatan kecepatan internet maupun blank spot
8	Sumber Air Minum dan Mandi/Cuci Masyarakat di Kawasan Perdesaan	
	1.1 Pengadaan unit pengolah air bersih yang bersumber dari sungai dan jaringan distribusi 1.2 Pengadaan profil tank 1.3 Pengembangan teknik pengolahan air bersih	Perlu ada update kegiatan untuk mengelola air minum dan mandi/cuci
9	Ketersediaan Bahan Bakar	
	Tidak ada program	Perlu update kegiatan tentang ketersediaan bahan bakar
10	Kios Sarana Produksi Pertanian	
	Tidak ada program	Perlu update kegiatan tentang ketersediaan kios saprotan
11	Pasar Kawasan Perdesaan	
	Tidak ada program	Perlu update kegiatan tentang ketersediaan pasar kawasan
12	Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan	
	Tidak ada program	Perlu update kegiatan tentang upaya untuk mendorong BUMDES/BUMDESMA untuk bekerjasama dengan perbankan BUMN Nasional untuk memberikan layanan perbankan

E. Dimensi Kelembagaan

E	Dimensi Kelembagaan	
1	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Norma Masyarakat dalam Meminimalisasi Alih Fungsi Lahan	
	Tidak ada program	Perlu dibuat PERDA dan atau mendorong masyarakat untuk membuat aturan tentang kebijakan meminimalisasi alih fungsi lahan, contoh PERDA LP2B
2	Kebijakan Daerah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal	
	Tidak ada program	Perlu ada kebijakan untuk penggunaan tenaga lokal, misalnya ada perda tentang afirmasi penggunaan tenaga kerja lokal.
3	Pengembangan Klaster Berbasis Komoditas Unggulan	
	Tidak ada program	Perlu dibentuk klaster dan pengelola (manajemen) klaster
4	Insentif/ Kebijakan Daerah tentang Investasi di Kawasan	
	Tidak ada program	Perlu dibuat kebijakan investasi daerah sesuai dengan UU Cipta kerja
5	Forum Pengembangan (Ekonomi) Daerah/ Kawasan Perdesaan di Aras Kabupaten/Kota	
	Tidak ada program	Agar dibentuk forum antar stakeholder yang mendorong perwujudan Kerjasama di aras kabupaten yang melibatkan khususnya pelaku usaha, pemerintahan daerah, akademisi, toga, tomas, LSM yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi wilayah, dan juga pendampingan
6	Kebijakan Daerah dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah Ditetapkan	
	Tidak ada program	SK Bupati tentang Penetapan Lokasi sesuai dengan Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan baik dalam RTRWK maupun RPJPD/RPJMD
7	Komitmen Daerah untuk Pembiayaan PKP yang telah Ditetapkan	
	Tidak ada program	Panganggaran selama tahun yang ada di RPJMD maupun RENSTRA OPD
8	Kebijakan Daerah tentang CSR untuk Kawasan Perdesaan yang telah Ditetapkan	
	Tidak ada program	Apakah perlu disusun perda tentang CSR? (Kalau ada CSR di kawasan tersebut.
9	Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian setempat untuk Meningkatkan Inovasi Pengembangan Komoditas Unggulan	
	Tidak ada program	Perlu dibuat kegiatan untuk

		meningkatkan kerjasama antara Pemda dan PT untuk menghasilkan inovasi dalam rangka peningkatan produktivitas Minaagrowisata, nilai tambahnya sampai kepada pemasarannya.
<b>10</b>	<b>Kebijakan Daerah tentang Promosi Kawasan</b>	
	6.3 Fasilitasi promosi dan pemasaran (dalam dan luar negeri)	Perlu dibuat kegiatan berkaitan region branding, dan juga promosi kawasan melalui internet dan lain sebagainya

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi

Berdasarkan hasil analisis dari isu strategis, rumusan tujuan dan sasaran, maka tahap selanjutnya adalah penjabaran strategi dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara, berikut strategi mencapai sasaran pembangunannya:

1. Peningkatan pengolahan dan pemanfaatan air sungai
2. Penambahan sarana penampungan air hujan
3. Peningkatan akses perhubungan darat
4. Pengembangan jaringan energi
5. Pengembangan jaringan komunikasi
6. Peningkatkan keterhubungan antar lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi
7. Pembangunan sarana pemasaran yang memadai
8. Peningkatan sarana distribusi
9. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola perkebunan
10. Penguatan modal dan kelengkapan alat pengolahan
11. Pengembangan usaha perkebunan yang berbasis komoditas unggulan
12. Pengaturan tata laksana lintas batas
13. Peningkatan kualitas hubungan social budaya

### 5.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, rumusan tujuan, sasaran, dan strategi, maka tahap selanjutnya adalah perumusan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara, berikut arah kebijakan dalam mencapai strategi pembangunannya:

1. Memenuhi kebutuhan dasar air bersih rumah tangga
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan
3. Memenuhi kebutuhan listrik untuk rumahtangga
4. Meningkatkan jangkauan jaringan komunikasi
5. Meningkatkan akses menuju lokasi perkebunan
6. Memfasilitasi pemasaran produk hasil UKM dan hasil panen masyarakat
7. Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan
8. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dengan pemberdayaan penyuluhan
9. Meningkatkan ketersediaan modal dan alat produksi pertanian
10. Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan
11. Memudahkan pelintas batas antar negara dan kegiatan promosi serta pemasaran
12. Memudahkan interaksi sosialbudaya antar negara

**Tabel V-1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Kurangya ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana	Terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai	Peningkatan pengolahan dan pemanfaatan air sungai	Memenuhi kebutuhan dasar air bersih rumah tangga
			Penambahan sarana penampungan air hujan	
			Peningkatan akses perhubungan darat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana

				perhubungan
		Terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga	Pengembangan jaringan energi	Memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga
		Terwujudnya kemudahan akses komunikasi	Pengembangan jaringan komunikasi	Meningkatkan jangkauan jaringan komunikasi
Rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan	Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan	Terdistribusikannya hasil panen perkebunan	Peningkatkan keterhubungan antar lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi	Meningkatkan akses menuju lokasi perkebunan
			Pembangunan sarana pemasaran yang memadai	Memfasilitasi pemasaran produk hasil ukm dan hasil panen masyarakat
			Peningkatan sarana distribusi	Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan
	Meningkatkan nilai jual perkebunan	Terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola perkebunan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dengan pemberdayaan penyuluhan
			Penguatan modal dan kelengkapan alat pengolahan	Meningkatkan ketersediaan modal dan alat produksi pertanian
			Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas	Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan
Adanya hubungan interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia	Mempermudah tata laksana lintas batas	Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku	Pengaturan tata laksana lintas batas	Memudahkan pelintas batas antar Negara dan kegiatan promosi serta pemasaran
	Mengeratkan hubungan social budaya antar negara	Terwujudnya hubungan sosial budaya yang harmonis	Peningkatan kualitas hubungan social budaya	Memudahkan interaksi social budaya antar negara

Sumber: Analisis, 2015

## BAB VI

### 6.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan desain besar (*grand design*) pengelolaan batas wilayah negaradan kawasan perbatasan tahun 2011-2025 terdapat pembahasan mengenai cakupan pengembangan dan lokasi prioritas. Kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terletak diwilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia sehingga termasuk dalam lokasi prioritas pengembangan. Perundang-undangan yang mengatur wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penyelesaian bataswilayah negara, serta mencerminkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung berorientasi “*inward looking*”, menjadi “*outward looking*” sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsep dasar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasanperbatasan dikembangkan salah satunya berdasarkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai *entry point* pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. Lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan dibutuhkan sebagai fokus pengelolaan perbatasan, penetapan lokasi prioritas atau kecamatan tidak hanya dilihat dari pembangunan lingkup kecamatan tetapi sebagai sistem pembangunan kawasan yang bertumpu pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan simpul-simpul pengembangannya. Kawasan perdesaan perkebunan yang terletak di Kecamatan Sebatik Tengah termasuk sebagai lokasi prioritas penanganan tahun 2010-2014 dan tambahan untuk tahun 2015-2019 serta tahun 2020-2024.

Dalam agenda prioritas pengelolaan batas Negara dan kawasan perbatasan darat tahun 2011-2025 aspek ekonomi kawasan terkait dengan keberlangsungan program dalam pembangunan kawasan perdesaan perbatasan Negara yaitu agenda penataan ruang di kawasan perbatasan darat, percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN di kawasan perbatasan darat, pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat, dan pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional. Selanjutnya aspek sosial dasar memiliki agenda percepatan dan peningkatan jangkauan mutu pelayanan sosial dan percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar.

Rencana aksi kementerian/lembaga pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun anggaran 2015 yang terkait kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terdapat program sebagai berikut:

- a. Peningkatan struktur jalan lingkar pulau sebatik
- b. Rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan lingkar pulau sebatik
- c. Pembangunan 4 RKB SMAN I Sebatik Tengah
- d. Modernisasi moda transportasi laut yaitu penyebrangan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik -Tawau Malaysia 30 GT

Berdasarkan arah kebijakan yang sudah ditentukan maka dirumuskan program atau instrumen yang sesuai untuk memecahkan masalah kawasan. Instrument ini berisi rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berikut program yang akan dijalankan dalam rencana perdesaan perkebunan di perbatasan Negara:

1. Program Peningkatan ketersediaan air bersih
2. Program Pengendalian Banjir
3. Program Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
4. Program Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya
5. Program Peningkatan layanan jaringan komunikasi
6. Program Peningkatan kualitas jalan usaha tani
7. Program Pembangunan jaringan pemasaran produk pertanian dan perkebunan

8. Program Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi
9. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengolahan
10. Program Peningkatan modal dan sarana produksi
11. Program Revitalisasi perkebunan
12. Program Pengadaan pupuk subsidi
13. Program Pemberantasan hama
14. Program Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmen darat Pulau Sebatik
15. Program Penguatan hubungan social budaya



Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
						Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan perkebunan dan pengaturan kewenangan lembaga petani
						Pelatihan bagi pengurus BUMDESMA
						Pelatihan Pengolahan makanan berbasis olahan hasil perkebunan ( Kakao dan Pisang)
			Penguatan modal dan kelengkapan alat pengolahan	Meningkatkan ketersediaan modal dan alat produksi pertanian	Peningkatan modal dan sarana produksi	Pemberian bantuan modal dan peralatan Mesin Pengolahan Pertanian/Perkebunan
		Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas	Pengembangan usaha perkebunan yang berbasis komoditas unggulan	Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan	Revitalisasi perkebunan	Pemberian bantuan modal BUMDESMA
					Penyediaan pupuk bersubsidi	Pengadaan, distribusi bibit dan pembangunan perkebunan
				Pemberantasan hama	Pengadaan pembasmi hama	
Adanya hubungan Interdependensi Antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia	Mempermudah tata laksana lintas batas	Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku	Pengaturan tatalaksana lintasbatas	Memudahkan pelintasbatas antar Negara dan kegiatan promosi serta pemasaran	Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmendarat Pulau Sebatik	Penetapan peraturan lintas batas yang sederhana
	Mengeratkan hubungan nsosial budaya antar negara	Terwujudnya hubungan yang harmonis antar negara	Peningkatan kualitas hubungan social budaya	Memudahkan interaksi social budaya antar negara	Penguatan hubungan social budaya	Pembentukan lembaga dari interaksi social budaya sebagai basis hubungan lainnya

Sumber: Hasil Analisis, 2020

## 6.2. Indikator Capaian Kerja

Berikut merupakan indikator capaian kerja dari rencana pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara:

**Tabel VI-2**  
**Indikator Capaian Rencana Pembangunan**  
**Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volum e	Satuan
Peningkatan ketersediaan air bersih	Pengadaan unit pengolah air bersih yang bersumber dari sungai dan jaringan distribusi / embung	Tercukupinya kebutuhan air bersih	Maspul	1	Unit
	Pengembangan teknik pengolahan air bersih	Tersedianya air yang memenuhi standar air baku konsumsi	Semua Desa	2	Unit
	Pipanisasi air bersih	Tercukupinya kebutuhan air bersih	Sei. Limau/Bukit Harapan	600	Unit
Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai	Meningkatnya kualitas sungai	Sei. Limau, Aji Kuning dan Bukit Harapan	13.000	m
	Pembangunan drainase	Tersedianya drainase yang baik	Semua Desa	10.000	m
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan jalan dan jembatan	Terhubungnya akses di dalam dan ke luar kawasan	Semua Desa	49.000	m <sup>2</sup>
	Peningkatan kualitas jalan	Meningkatnya kualitas jalan	Semua Desa	49.000	m <sup>2</sup>
	Betonisasi jembatan	Meningkatnya kualitas jembatan	Semua Desa	300	m <sup>2</sup>
	Penanganan longsor jalan lingkaran pulau Sebatik Bambangan - Ajikuning	Meningkatnya kualitas jalan	Sei Limau	4	paket
Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya	Pembangunan dan pengembangan jaringan pembangkit energi listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Desa Sungai Limau, Desa Aji Kuning, Desa Bukit Harapan	2	Paket
	Pengadaan Lampu Jalan/PJU	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Semua Desa	4	Paket
Peningkatan layanan jaringan komunikasi	Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi	Desa Bukit Harapan	1	Unit
Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Terhubungnya lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi	Semua Desa	80.000	m <sup>2</sup>
Pembangunan jaringan pemasaran produk pertanian dan perkebunan	Fasilitasi promosi dan pemasaran (dalam dan luar negeri)	Tersedianya pasar dalam dan luar negeri	Semua Desa	4	Paket
Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi	Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan	Tercukupinya kebutuhan moda transportasi untuk pengangkutan dan distribusi	Semua Desa	5	Unit
	Peningkatan kualitas dermaga bongkar muat	Meningkatnya kualitas dermaga bongkar muat untuk mempermudah distribusi	Desa Aji Kuning	1	Unit
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelatihan dan penyuluhan pengolahan hasil produksi pertanian/perkebunan	Peserta mampu mengolah hasil pertanian/perkebunan	Semua Desa	4	Paket
	Penyuluhan dan Pendampingan bagi pelaku usaha	Pelaku usaha mampu bersaing dalam pasar	Semua Desa	4	Paket
	Pelatihan dan	Lembaga petani		4	Paket

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan
	penyuluhan pengelolaan perkebunan dan pengaturan kewenangan lembaga petani	mampu mengolah kebun dan memiliki kewenangan yang jelas	Semua Desa		
	Pelatihan tata kelola BUMDESMA	Pengurus Bumdes Mampu mengelola dan meningkatkan tatakelola Bumdesma	Pengurus Bumdesma	2	Paket
Peningkatan modal dan sarana produksi	Pemberian bantuan modal dan peralatan	Tercukupinya kebutuhan modal dan alat pengolahan hasil pertanian/perkebunan	Semua Desa	4	Paket
	Pemberian bantuan alat dan mesin pengolahan pertanian	Tersedianya alan dan mesin yang baik	Bumdesma	2	Paket
	Pemberian bantuan modal BUMDESMA	Tercukupinya modal usaha BUMDESMA	Bundesma	2	Paket
Revitalisasi perkebunan/pertanian	Pengadaan, distribusi bibit dan pembangunan perkebunan	Tumbuh dan berkembangnya bibit unggul	Semua Desa	1.500	Ha
Penyediaan pupuk bersubsidi	Pengadaan pupuk bersubsidi	Tercukupinya jumlah kebutuhan bibit kelapa sawit dan coklat untuk meningkatkan produktivitas	Semua Desa	1.500	Ton
Pemberantasan hama	Pengadaan pembasmi hama	Tercukupinya jumlah kebutuhan pupuk pada saat musim tanam	Semua Desa	1.500	Ha
Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmen darat PulauSebatik	Penetapan peraturan lintas batas yang sederhana	Terbentuknya peraturan yang sederhana dan baku di Pos Lintas Batas Darat (PLBD)	PosLintas Batas Darat (Aji Kuning, Sungai Limau, dan Maspul)	1	Paket
Penguatan hubungan social budaya	Pembentukan lembaga dari interaksi social budaya sebagai basis hubungan lainnya	Terbentuknya lembaga social budaya	Desa Aji Kuning, Sungai Limau danMaspul	1	Paket

Sumber: Hasil Analisis, 20

### 6.3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan perkebunan berasal dari berbagai sumber seperti Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, swadaya masyarakat, maupun kerjasama dengan pihak swasta. Berikut ini tabel sumber pendanaan program dan kegiatan.

**Tabel VI-3**  
**Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan**  
**Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara**

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum			Sebaik Tengah			2.500.000.000	APBN APBD		6.250.000.000	6.250.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR tersedia	Sebaik Tengah			1.800.000.000	APBN APBD		450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
	a. Penyusunan Rencana, kebijakan strategis dan Teknik SPAM	Panjang pemasangan jaringan pipa air bersih yang terpasang	Sebaik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	b. Supervisi Pembangunan/peningkatan/pelebaran/perbaikan SPAM	Tersedianya Pengawasan yang memadai	Sebaik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	c. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tercapainya sarana dan Prasarana air bersih yang memadai	Sebaik Tengah			2.000.000.000	APBN APBD		500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Air			Sebaik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
(SDA)												
	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Nunukan	Panjang kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	a. Pembangunan Tanggul Sungai		Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	b. Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang sungai dilakukan normalisasi	Sebatik Tengah	13.000	m	25.000.000.000	APBN APBD		6.250.000.000	6.250.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000
	c. Operasi dan pemeliharaan embung dan penampungan air lainnya		Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	2. Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik	Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	a. Pembangunan Jaringan irigasi Permukaan		Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	b. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	c. Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan		Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Sebatik Tengah			185.000.000	APBN APBD	√	√	√	√	√
	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Sungai	Jumlah pemukiman yang difasilitasi drainase	Sebatik Tengah			185.000.000	APBN APBD	√	√	√	√	√
	a. Pembangunan sistem drainase lingkungan	Terlaksananya pembangunan Drainase yang memadai	RT.02 Desa Aji Kuning Sebatik tengah	1	Paket	185.000.000	APBD	√				
Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan dan dipelihara	Sebatik Tengah				APBN APBD	√	√	√	√	√
	a. Pembangunan Jalan	Jalan yang terbangun	Sebatik Tengah				APBN APBD		√	√	√	√
	b. Rekonstruksi jalan RT.03 Bukit Harapan	Panjang jalan yang direkonstruksi	Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah	1	paket	500.000.000	APBN APBD	√				
	c. Rekonstruksi Jalan Pak Majid RT.03 Bukit Harapan	Panjang jalan yang direkonstruksi	Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah	1	paket	490.000.000	APBN APBD	√				
	d. Rehabilitasi jalan dan jembatan	Panjang jalan yang diperbaiki/direhabilitasi	Sebatik Tengah	1	Paket	2.500.000.000	APBN APBD	√	√	√	√	√
	e. Pembangunan Jembatan RT.04 Desa	Panjang jembatan yang terbangun	Desa Sei Lima Kecamatan	1	Paket	690.000.000	APBN APBD	√				

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
	Sungai Limau		mata Sebatik Tengah									
Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya	1. Pembangunan dan pengembangan jaringan pembangkit energi listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Sebatik Tengah	2	Paket	6.000.000.000	APBN APBD	√	√	√	√	√
	2. Pengadaan Lampu Jalan/PJU	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Sebatik Tengah	4	Paket	4.000.000.000	APBN APBD	√	√	√	√	√
Peningkatan layanan jaringan komunikasi	1. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi	Sebatik Tengah	1	Unit	1.200.000.000	APBN APBD	√	√	√	√	√
Program Penyuluhan pertanian		1. Rasio peningkatan kapasitas Poktan 2. Rasio peningkatan kapasitas BPP dan PPL	Sebatik Tengah			150.931.900	APBD	√	√	√	√	√
	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah Peningkatan kemampuan Poktan 2. Jumlah peningkatan kapasitas BPP	Sebatik Tengah			150.931.900	APBD	√	√	√	√	√
	a. Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan	Sebatik Tengah	1	BPP	25.000.000	APBD	√	√	√	√	√
	b. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan petanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Sebatik Tengah	3	unit	100.000.000	APBD	√	√	√	√	√
	c. Pengembangan	Jumlah Kelembagaan	Sebatik	3	Kelompok	25.931.900	APBD	√	√	√	√	√

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	an Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Tengah		k							
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase luas wilayah yang terkendali Bencana Pertaniannya	Sebatik Tengah			196.890.000	APBD	√	√	√	√	√
	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	1. Pengendalian Pestisida Tanaman pangan untuk stok dinas 2. Pengendalian Pestisida Tanaman holtikultura untuk stok dinas	Sebatik Tengah			196.890.000	APBD	√	√	√	√	√
	a. Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan perkebunan	Jumlah luas serangan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Sebatik Tengah	1	Paket	196.890.000	APBD	√	√	√	√	√
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Persentase laju pertumbuhan ketersediaan Prasarana Pertanian 2. Persentase ketersediaan Prasarana Peternakan	Sebatik Tengah			12.172.794.300	APBD	√	√	√	√	√
	1. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Sebatik Tengah			12.172.794.300	APBD	√	√	√	√	√
	a. Pembangunan Rehabilitasi dan	Jumlah Jaringan irigasi Usaha	Sebatik Tengah	5	Unit	970.680.000	APBD	√	√	√	√	√

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha Tani	tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara										
	b. Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan Usaha tani	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Sebatik Tengah	3	unit	100.000.000	APBD	√	√	√	√	√
	c. Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana penduduknya	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Sebatik Tengah	3	Kelompok	25.931.900	APBD	√	√	√	√	√
	d. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Sebatik Tengah	5	Unit	3.699.615.800	APBD	√	√	√	√	√
	e. Bantuan Bibit Kakao		Sepulau Sebatik	2	Ha							
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Peningkatan Jumlah Sentra IKM										
	1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota		Kabupaten Nunukan	1	dok							
	a. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri			20	IKM	20.650.000	APBD	√	√	√	√	√

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
	dan Peran serta masyarakat											
Program pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya		11,41	Person							
	1. Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota		Kabupaten Nunukan	sdm	Koperasi							
	a. Peningkatan permohonan dan Pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi			25	Koperasi		APBD					
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kab/Kota		Kabupaten Nunukan									
	a. Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat			7	Kecamatan							
	2. Pengendalian Harga, dan stok		Kabupaten Nunukan									

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
	barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kab/Kota		ukan									
	a. Pemantauan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan			19	Kecamatan							
Program Peningkatan Destinasi Pariwisata Kab/Kota												
1	Pengelolaan daya tarik wisata Kab/Kota		Kabupaten Nunukan									
	a. Pengembangan daya tarik wisata			1	Lokasi		APBD					
2	Pengolahan Destinasi Pariwisata kab/kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Kabupaten Nunukan				APBD					
	a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata kab/kota			1	Lokasi		APBD					
Program Pemasaran Pariwisata												
1	Pemasaran Pariwisata dalam		Kabupaten									

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
	dan luar dengan daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota		Nunukan									
Program Pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif												
1	Pengembangan Jumlah Kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Kabupaten Nunukan									
	a. Pelatihan Bimtek dan Pendampingan ekonomi kreatif			50	orang		APBD					
Pembangunan jaringan pemasaran produk pertanian dan perkebunan	Pembangunan tempat pembinaan produksi dan pengumpulan hasil panen dan produksi	Tersedia tempat pembinaan produksi dan pengumpulan	Desa Maspul, Desa Sei.Limau	2	Unit	1.200.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Fasilitasi promosi dan pemasaran (dalam dan luar negeri)	Tersedia pasar dalam dan luar negeri	Semua Desa	4	Paket	400.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Pengadaan sarana angkutan hasil produksi	Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan	Tercukupinya kebutuhan moda transportasi untuk pengangkutan dan distribusi	Semua Desa	4	Unit	1.600.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Peningkatan kualitas dermaga bongkar muat	Meningkatkan kualitas dermaga bongkar muat untuk mempermudah distribusi	Desa Aji Kuning	1	Unit	4.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan hasil produksi perkebunan / pertanian	Peserta mampu mengolah hasil perkebunan / pertanian	Semua Desa	4	Paket	400.000.000	APBD I APBD II DD/CSR					
	Penyuluhan	Pelaku	Sem	4	Pake	400.00	APBD					

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
a	dan Pendampingan bagi pelaku usaha	usaha mampu bersaing dalam pasar	Desa		t	0.000	I APBD II DD/ CSR					
	Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan perkebunan dan penguatan kewenangan lembaga petani	Lembaga petani mampu mengolah kebun dan memiliki kewenangan yang jelas	Semua Desa	4	Paket	400.000.000	APBD I APBD II DD/ CSR					
	Pelatihan tata kelola BUMDESMA	Pengurus Bumdes Mampu mengelola dan meningkatkan tatakelola Bumdesma	Pengurus Bumdesma	2	Paket	200.000.000	APBD I APBD II DD/ CSR					
Peningkatan modal dan sarana produksi	Pemberian bantuan modal dan peralatan	Tercukupinya kebutuhan modal dan alat mesin pengolahan pertanian/perkebunan	Semua Desa	4	Paket	2.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/ CSR					
	Pemberian bantuan modal BUMDESMA	Tercukupinya modal usaha BUMDESMA	Bumdesma	2	Paket	500.000.000	APBN APBD I APBD II DD/ CSR					
Revitalisasi perkebunan/pertanian	Pengadaan, distribusi bibit dan pembangunan perkebunan	Tumbuh dan berkembangnya bibit unggul	Semua Desa	1.500	Ha	5.000.000.000	APBD II/ CSR					
Penyediaan pupuk bersubsidi	Pengadaan pupuk bersubsidi	Tercukupinya jumlah kebutuhan pupuk kelapa sawit dan coklat untuk meningkatkan produktivitas	Semua Desa	1.500	Ton	5.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/ CSR					
Pemberantasan hama	Pengadaan pembasmi hama	Tercukupinya jumlah kebutuhan pembasmi hama pada tanaman	Semua Desa	1.500	Ha	700.000.000	APBD I APBD II DD/ CSR					
Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmen darat pulau sebatik	Penetapan peraturan lintas batas yang sederhana	Terbentuknya peraturan yang sederhana dan baku di PosLintas Batas Darat (PLBD)	PosLintas Batas Darat (Aji Kuning, Sungai Lima, dan	1	Paket	1.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/ CSR					

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
								2022	2023	2024	2025	2026
			Maspul)									
Penguatan hubungan social budaya	Pembentukan lembaga dari interaksi social budaya sebagai basis hubungan lainnya	Terbentuknya lembaga social budaya	Desa Aji Kuning, Sungai Lima dan Maspul	1	Paket	300.000.000	APBN					

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
 Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP  
 NIP. 19710608 200212 1 007